

**ANALISIS DETERMINAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
RUMAHTANGGA PETANI DALAM RANGKA Mendukung ARAHAN
KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM Mengatasi KEMISKINAN
PETANI**

(Studi di Desa Bogem Kecamatan Bayat, Klaten Jawa Tengah)

Laporan Penelitian Strategis Dosen STPN

Disusun oleh:

**SENTHOT SUDIRMAN
IG. INDRADI
ANTONIUS SRIYONO
AGUS PRAYITNO**

Diajukan Kepada:

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS DOSEN STPN

**ANALISIS DETERMINAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
RUMAHTANGGA PETANI DALAM RANGKA Mendukung ARAHAN
KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM Mengatasi KEMISKINAN
PETANI**

(Studi di Desa Bogem Kecamatan Bayat, Klaten Jawa Tengah)

Disusun Oleh:

**Senthot Sudirman
Ig. Indradi
Antonius Sriyono
Agus Prayitno**

**Telah diseminarkan pada hari Selasa 29 Nopember 2011
di Hotel Gowongan Inn Yogyakarta**

**Yogyakarta, 29 Pebruari 2012
Disetujui dan disahkan oleh:
A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

**Dr. Oloan Sitorus, SH., MS.
NIP.19650805 199203 1 003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya telah dapat diselesaikan kegiatan penelitian dan penulisan laporan penelitian strategis dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun akademik 2010/2011 yang berjudul ” Analisis Determinan dan Program Pengentasan Kemiskinan Rumahtangga Petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat” tanpa hambatan yang berarti.

Dalam melaksanakan penelitian ini kami dibantu oleh berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil serta kemudahan-kemudahan pengurusan administrasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan.
2. Para pembimbing dan pengarah, serta Tim Evaluator Penelitian STPN.
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan staf di STPN.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten beserta staf.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten beserta staf.
6. Kepala BPS Kabupaten Klaten beserta staf.
7. Camat Bayat beserta staf.
8. Kepala dan pamong Desa serta masyarakat Desa Bogem.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu atas semua bantuannya.

Dari penelitian ini dihasilkan informasi tentang rumahtangga petani di Desa Bogem dalam hal (a) struktur rumahatangga petani menurut kemiskinannya, (b) faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan tersebut, (c) kombinasi luas penguasaan tanah minimal dan jenis penggunaan tanah yang dapat menghasilkan pendapatan usahatani untuk mentas dari kemiskinan, (d) macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan yang ada, dan (e) implikasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan karakteristik fisik, sosial-ekonomi wilayah serta program pengentasan kemiskinan yang ada. Diharapkan informasi tersebut bermanfaat.

Demikian, semoga ada tindaklanjut penelitian ini yang berguna bagi masyarakat Bogem dan wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
INTISARI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
1.4 Keaslian Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	17
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.1.1 Kemiskinan dan Program-Program Pengentasan Kemiskinan	17
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan	17
2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan	20
2.1.1.3 Jenis, Indikator dan Ukuran Kemiskinan	22
2.1.1.3.1 Jenis Kemiskinan	22
2.1.1.3.2 Indikator Kemiskinan	23
2.1.1.4 Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan	30
2.1. 2 Distribusi Penguasaan Tanah dan Pendapatan Petani	34
2.1. 3 Reforma Agraria	38
2.2 Landasan Teori	42
2.2.1. Teori Produksi	42
2.2.2. Teori Pendapatan Usahatani dan Fungsi Keuntungan	50
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	57
2.4. Hipotesis	59
2.5 Definisi Operasional	60
BAB III. METODE PENELITIAN	62
3.1 Format Penelitian	62
3.2 Lokasi Penelitian	63
3.3 Populasi dan Sapel Penelitian	65
3.4 Jenis, Teknik Pengumpulan, Alat Pengumpulan, dan Sumber Data	65
3.5 Teknik Analisis Data	66

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	70
4.1 Wilayah Administrasi dan Pemerintahan	70
4.2 Kependudukan	71
4.3 Kondisi Fisik	74
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	 76
5.1. Struktur Rumahtangga Miskin di Desa Bogem	76
5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumahtangga Petani ...	81
5.3 Luas Penguasaan Pemilikan Lahan Pertanian dan Jenis Usahatani Untuk Mentas dari Kemiskinan di Desa Bogem	110
5.4. Macam dan Manfaat Program-program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Bogem	113
5.5. Implikasi Kebijakan untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Bogem ..	116
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	 120
6.1. Kesimpulan	120
6.2 Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA	 122

DAFTAR TABEL

1.1 Penduduk miskin Kabupaten Klaten dan Daerah Sekitarnya	9
1.2 Penduduk (keluarga) miskin Kabupaten Klaten 2004	10
1.3 Penduduk (keluarga) miskin Kecamatan Bayat 2004	11
1.4 Garis kemiskinan di Indonesia	28
4.1 Penduduk menurut Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur	71
4.2 Keluarga Para Sejahtera menurut Desa	73
4.3 Luas Wilayah Menurut Desa, Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah	75
5.1 Masyarakat Miskin menurut kriteria Sayogya (1976, dimodifikasi) di Desa Bogem	77
5.2 Masyarakat Miskin menurut kriteria BPS (1993, dimodifikasi) di Desa Bogem	78
5.3 Masyarakat miskin menurut kriteria Bank Dunia di Desa Bogem	80
5.4 Statistik regresi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kesejahteraan (nirkemiskinan) rumahtangga petani di Desa Bogem	83
5.5 Komposisi kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	84
5.6 Komposisi rumahtangga berdasarkan jumlah anak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	86
5.7 Komposisi rumahtangga berdasarkan jumlah tanggungan keluarga di Desa Bogem Kecamatan bayat	87
5.8 Komposisi tingkat pendidikan anak berdasarkan urutan nomor anak dari masyarakat Desa Bogem Kecamatan Bayat	88
5.9 Frekuensi warga Desa Bogem menerima wesel	90
5.10 Proporsi pendapatan rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pendapatan totalnya di Desa Bogem	91
5.11 Proporsi pengeluaran rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pengeluaran totalnya	95

5.12	Keragaan kepemilikan lahan pekarangan di Desa Bogem Kecamatan Bayat ..	97
5.13	Keragaan kepemilikan lahan pertanian tegalan di Desa Bogem Kecamatan Bayat	98
5.14	Distribusi luas dan asal lahan garapan di Desa Bogem , Kecamatan Bayat	100
5.15	Keragaan jenis dan luas tanah kekayaan desa dan bengkok di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	102
5.16	Komposisi kepala keluarga berdasarkan pekerjaannya di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	106
5.17	Komposisi kepala keluarga berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	107
5.18	Kepemilikan ternak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	108
5.19	Klasifikasi penduduk menurut umur di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	109
5.20	Contoh analisis pendapatan usahatani padi menggunakan harga bayangan	110
5.21	Contoh analisis pendapatan usahatani kacang tanah menggunakan harga bayangan	111
5.22	Contoh analisis pendapatan usahatani jagung menggunakan harga bayangan	112

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kurva lorentz (Remi dan Herijanto, 2002:41; Rusli, dkk., 1995:12; Widodo (1990:118).	24
2.2 Grafik hubungan Input dan Output	45
2.3 Bagan alir kerangka pemikiran penelitian	57
3.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten	63
3.2 Lokasi penelitian	64
4.1 Struktur organisasi Pemerintah Desa Bogem	71
5.1 Masyarakat miskin menurut kriteria Sayogya (dimodifikasi)	78
5.2. Masyarakat miskin menurut kriteria BPS (1993, dimodifikasi) di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.	79
5.3. Masyarakat miskin menurut kriteria BPS (dimodifikasi) di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.	81
5.4. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	84.
5.5. Komposisi rumahtangga berdasarkan jumlah anak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	86.
5.6. Komposisi rumahtangga berdasarkan tanggungan keluarga di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.	87
5.7. Komposisi tingkat pendidikan anak berdasarkan urutan nomor anak dari masyarakat di Desa Bogem Kecamatan Bayat (orang)	89
5.8. Frekuensi warga Desa Bogem menerima wesel.	90
5.9. Proporsi pendapatan rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pendapatan totalnya di Desa Bogem.	92
5.10. Proporsi pengeluaran rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pengeluaran totalnya di Desa Bogem.....	92
5.11. Keragaan kepemilikan lahan pekarangan di Desa Bogem Kecamatan Bayat	97
5.12. Keragaan kepemilikan lahan pertanian di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	99

5.13	Luas dan asal lahan garapan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	101
5.14.	Asal lahan garapan, luas (%), dan jumlah penggarap (KK) di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.	102
5.15	Keragaan jenis dan luas tanah kekayaan desa dan bengkok di Desa Bogem, Kecamatan Bayat (m ²).	103
5.16.	Keragaan jenis dan luas tanah kekayaan desa dan bengkok di Desa Bogem, Kecamatan Bayat (%).	103
5.17.	Komposisi kepala keluarga berdasarkan pekerjaannya di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.	106
5.18.	Komposisi kepala keluarga berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.	107
5.19	Kepemilikan ternak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat	108.
5.20.	Komposisi kepala keluarga berdasarkan umur di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.....	109

INTISARI

Telah dilaksanakan penelitian yang berjudul “ Analisis Determinan dan Program Pengentasan Kemiskinan Rumahtangga Petani dalam rangka Mendukung Arahan Kebijakan Reforma Agraria dalam Mengatasi Kemiskinan Petani” di Desa Bogem Kecamatan Bayat yang bertujuan untuk mengetahui: (a) struktur rumahtangga petani menurut tingkat kemiskinannya, (b) faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumahtangga petani, (c) kombinasi luas minimal penguasaan pemilikan tanah dan jenis penggunaan tanah pertanian yang mampu mengentaskan kemiskinan rumahtangga petani, (d) macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam mengurangi jumlah rumahtangga petani miskin, dan (e) merancang usulan kebijakan reforma agraria dalam rangka pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di tingkat desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan survei dan dokumentasi digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Data dianalisis secara deskriptif dan eksplanatif menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil analisis data disajikan dalam wujud tabel dan diagram batang untuk selanjutnya dibahas dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) kalsifikasi penduduk miskin menurut kriteria Sayogya dan Bank Dunia menunjukkan kemiripan dan lebih menunjukkan gambaran kondisi kemiskinan di Desa Bogem daripada kelas kemiskinan menurut kriteria BPS, (b) faktor jumlah anak dan nisbah antara pengeluaran dan pendapatan mendorong secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan faktor pendapatan nonpertanian secara signifikan mampu menekan terjadinya kemiskinan di Desa Boge. Faktor-faktor lain meliputi pendidikan, wesel, pendapatan pertanian, luas pemilikan lahan pertanian, luas lahan garapan, dan jumlah variasi sumber pendapatan menekan kemiskinan namun tidak secara signifikan (c) luas lahan pertanian sawah yang diperlukan agar dapat mentas dari kemiskinan adalah seluas 1.849 m² untuk tanaman padi, atau 1.066 m² untuk tanaman kacang tanah, atau seluas 3.395 m² untuk tanaman jagung, (d) bantuan pengeentasan kemiskinan yang ada meliputi bantuan untuk (i) pembangunan fisik, (ii) penyuluhan dan pelatihan, (iii) peralatan, (iv) permodalan, (v) kesehatan, (vi) bantuan langsung tunai, (vi) raskin, (vii) sertifikasi melalui PRODA dan PRONA, dan (viii) tanaman buah-buahan; (e) kebijakan pengentasan kemiskinan yang diduga sesuai untuk masyarakat Desa Bogem adalah kombinasi antara pemberdayaan potensi nonpertanian melalui peningkatan kualitas SDM, *interpreneurship*, dan bantuan permodalan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan (a) perlu penelitian serupa untuk desa-desa lain yang memiliki keragaman potensi, dan (b) perlu memperkuat analisis usahatani untuk menentukan luas lahan minimal yang diperlukan untuk mentas dari kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan, sehingga keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Kemiskinan terjadi karena masyarakat pelaku ekonomi tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga diwarnai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan (Soegijoko, 1997:137). Oleh karena itu, masyarakat miskin memiliki kemampuan yang lemah dalam berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas). Hal ini menyebabkan permasalahan kemiskinan menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan upaya penanggulangan dan penyelesaian secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Hendriwan, 2003).

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an yang diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin

pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan adanya ketidak-merataan pendapatan yang melebar antar sektor, antar kelompok, dan antar wilayah pada era itu juga meningkatkan kemiskinan. Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra). Adanya program-program tersebut dan program pembangunan lainnya secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi dengan timbulnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Akibat krisis ekonomi yang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Krisis ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan juga dikemukakan oleh BPS (BPS, 2003;575). Dalam kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas). Bertambahnya jumlah penduduk yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan itulah yang menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat.

Mengantisipasi timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini meliputi: 1) program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; 2) program pendidikan dan

perlindungan sosial; 3) program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin; 4) program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002: 29-30)

Upaya tersebut dilanjutkan dengan meluncurkan program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM/DKE) pada akhir tahun 1998 berupa pemberian dana langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Berikutnya pemerintah juga melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan sasaran perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan sasaran perkotaan. Sebagai kelanjutan Program JPS, pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) yang dilaksanakan diantaranya pada bidang pangan, kesehatan, pendidikan, prasarana dan sebagainya. Sejak digiatkannya kembali program-program pengentasan kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia secara perlahan berhasil diturunkan jumlahnya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 sebesar 49,5 juta jiwa (24,2% dari jumlah penduduk Indonesia), pada tahun 2002 telah turun menjadi 38,4 juta jiwa (18,20%) dan pada tahun 2003 sebesar 37,3 juta jiwa (17,4%). Dari jumlah penduduk miskin 37,3 juta jiwa tersebut, 21,5 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali atau 16,49 % dari jumlah penduduk di pulau tersebut (BPS, 2003:577).

Informasi tersebut di atas memberi gambaran bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada masa yang lalu diakui mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Mengingat pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan Jilid II juga telah dan sedang dilakukan program-program pengentasan kemiskinan, maka untuk mengetahui apa dan sejauh mana keberhasilan

program-program pengentasan kemiskinan tersebut maka penting untuk dilakukan pengkajian. Kajian tentang macam program dan manfaatnya dalam mengentaskan kemiskinan perlu dilaksanakan pada tingkat desa, agar dapat secara langsung menyentuh pada pihak yang mengalami permasalahan kemiskinan yaitu rumahtangga petani.

Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat krisis ekonomi, tetapi juga dikarenakan perubahan standar yang digunakan dalam penentuan ambang batas kemiskinan (BPS, 2003:575). Standar penentuan ambang garis kemiskinan yang umumnya digunakan untuk mengukur kemiskinan ini misalnya adalah Standar Pengukuran Kemiskinan Sayogyo (1976), Direktorat Jenderal Agraria (1976), BPS (1998), dan Bank Dunia (1990). Standar Sayogyo (1976) menggunakan pendapatan petani setara produksi beras per kapita per tahun untuk mengukur kemiskinan. Pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan petani untuk memenuhi angka kecukupan energi yang konsumsi per kapita per hari sebesar 2100 kilo kalori ditambah pendapatan untuk membiayai kebutuhan minimum non makanan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pakaian dan papan dikembangkan oleh BPS (1998). Pemenuhan sembilan kebutuhan pokok meliputi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Agraria (1976) juga digunakan untuk mengukur kemiskinan penduduk. Bank Dunia (1990) menggunakan angka pendapatan US \$ 275 per kapita per tahun untuk mengukur kemiskinan.

Oleh karena itu melalui rencana penelitian ini juga perlu dikaji besarnya rumahtangga petani miskin yang ditentukan menggunakan beberapa standar tersebut.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menilai sensitifitas standar-standar pengukuran kemiskinan tersebut dalam menggambarkan kemiskinan rumah tangga petani di pedesaan.

Di pedesaan struktur penguasaan lahan dan struktur pendapatan merupakan dua hal yang cenderung menjadi perhatian, karena struktur penguasaan lahan cenderung mempengaruhi struktur pendapatan. Fenomena ini terjadi karena lahan bagi masyarakat pedesaan merupakan faktor produksi yang menentukan tinggi rendahnya pendapatan, sehingga jika struktur luas penguasaan lahannya merata, maka pendapatannya juga akan merata.

Johnston dan Clark (1985: 210) mengemukakan bahwa struktur luas penguasaan tanah serta pilihan teknologi berpengaruh terhadap tingkat dan distribusi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, desa-desa yang kesempatan kerja di luar pertanian sangat terbatas, distribusi penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan, sedangkan bagi desa-desa yang kesempatan kerja di luar pertanian sudah terbuka, distribusi penguasaan lahan tidak berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan (Mintoro, 1983:45). Terbukanya kesempatan berusaha di luar pertanian menunjukkan bahwa penghasilan petani bukan hanya berasal dari sektor pertanian tetapi juga berasal dari kegiatan lain dengan demikian penguasaan lahan bukan satu-satunya sumber penghasilan bagi petani dan yang menentukan distribusi pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 1990 dapat diketahui bahwa rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga di Indonesia 0,38 hektar sementara sebarannya cukup merata sebagaimana ditunjukkan oleh Koefisien Gini sebesar 0,3213. Todaro (1985: 306) menyatakan di kebanyakan negara yang struktur kepemilikan tanahnya tidak merata merupakan penyebab utama ketidak-merataan pembagian pendapatan dan kesejahteraan

di pedesaan. Hal yang sama juga diungkapkan Syahrudin (1980: 36) bahwa terdapat hubungan yang berarti antara struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dengan struktur pendapatan petani di pedesaan Sumatera Barat. Informasi yang serupa disampaikan oleh Hayami (1981: 46) dan Cooler dalam Hayami (1985: 280).

Memperhatikan adanya hubungan yang erat antara struktur penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian dengan pendapatan petani di pedesaan, maka dapat diartikan bahwa struktur luas penguasaan dan kepemilikan tanah juga berkaitan erat dengan kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu dalam rencana penelitian ini perlu dikaji hubungan antara struktur luas penguasaan dan kepemilikan tanah rumahtangga petani di pedesaan dengan pendapatan petani dan kemiskinan di wilayah tersebut. Melalui kajian ini diharapkan juga dapat diestimasi luas penguasaan dan kepemilikan tanah minimal yang diperlukan oleh rumahtangga petani miskin untuk mentas dari kemiskinannya dengan memperhitungkan pula pendapatan dari luar usahatani. Kajian tentang struktur luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian ini kaitannya dengan pendapatan dan kemiskinan petani menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan kemungkinan tingginya fragmentasi luas tanah pertanian baik melalui pewarisan maupun jual beli.

Dalam era BPNRI ini banyak perubahan mendasar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran instansi pemerintah ini dalam kiprah pembangunan nasional, salah satunya adalah program reforma agraria. Dalam kerangka itu, maka reforma agraria harus dipahami bukan hanya sebagai kebijakan tentang distribusi tanah (*land reform*), melainkan juga sebagai proses yang lebih luas (*agrarian reform*) yang meliputi akses terhadap sumber-sumber alam (tanah, air, tanaman dalam kasus para penyadap, dsb),

terhadap dana, teknologi, barang-barang dan pasar tenaga kerja serta secara khusus terhadap distribusi kekuatan politik (Rosset *et al.*, 2008: 301).

Menurut Rosset tersebut, reforma agraria (*agrarian reform*) mencakup aspek yang jauh lebih luas daripada sekedar *land reform* yang memungkinkan BPNRI dapat berkiprah secara lebih luas dalam pembangunan bangsa termasuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengkaji aspek kemiskinan ini dari sudut pandang *agrarian reform* untuk menjaring informasi terpadu dalam kerangka perumusan kebijakan reforma agraria guna pengentasan kemiskinan berbasis desa.

Tantangan utama dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin tersebut melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan terpadu agar terjadi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas).

Selaras dengan maksud UU No. 25 Tahun 2000 tersebut di atas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial maka campur tangan pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan masih tetap diperlukan. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh informasi guna merumuskan perbaikan kebijakan mengenai hal tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji tentang macam dan manfaat dari implementasi program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam upaya pementasan kemiskinan melalui peningkatan dan pengembangan usaha produktif menurut UU tersebut perlu kajian mengenai potensi desa yang mencakup (a) struktur penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah sebagai modal pokok usaha produktif bagi rumahtangga petani, (b) produktivitas tanah pertanian, (c) struktur kualitas SDM rumahtangga petani sebagai pelaku usaha produktif baik dalam sektor pertanian maupun non pertanian, (d) kondisi pengembangan usahatani yang ada, dan (e) peranan dari berbagai pihak dalam rangka membantu rumahtangga petani untuk mengembangkan asetnya bagi usaha produktif termasuk dari program reforma agraria.

Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah termasuk kabupaten yang mempunyai persentase penduduk miskin cukup tinggi yakni mencapai lebih dari 20 % jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya baik di Provinsi Jawa Tengah maupun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menonjol seperti terlihat dalam Tabel 1.1. Nilai garis kemiskinan tersebut mengacu pada kebutuhan minimum 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. (BPS, 2003:580).

Tabel 1.1 Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dan Daerah Sekitarnya

No.	Kabupaten	Tahun 2002			Tahun 2003		
		Jiwa (000)	(%)	Garis Kemiskinan	Jiwa (000)	(%)	Garis Kemiskinan
1	Boyolali	188,4	20,78	88,363	171,1	18,48	98,259
2	Klaten	286,5	24,54	104,347	267,1	23,84	125,259
3	Sukoharjo	134,8	16,86	105,071	122,5	15,17	128,010
4	Wonogiri	245,8	25,22	102,932	242,0	24,09	121,245
5	Karanganyar	134,0	17,04	107,583	141,7	17,45	133,215
6	Sragen	245,0	28,62	95,302	232,3	27,01	113,991

7	Kota Surakarta	69,4	14,23	108,328	72,8	15,00	131,084
8	Jawa Tengah	7.308,3	23,06	106,438	6,979,8	21,78	119,403
9	Kulon Progo	93,0	25,12	105,404	91,4	24,35	119,538
10	Bantul	157,2	19,75	106,807	163,1	20,00	117,244
11	Gunung Kidul	174,1	25,86	96,701	173,8	25,35	117,572
12	Sleman	154,2	16,70	120,316	159,2	16,93	161,846
13	Kota Yogyakarta	57,2	14,52	132,059	49,4	12,63	161,846
14.	DIY	635,7	20,14	112,995	636,8	19,85	127,089

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002 dan 2003.

Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Klaten, namun terkendala dengan keterbatasan baik secara organisasi, manajemen maupun keuangan. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama-sama komponen masyarakat melaksanakan tugas tersebut yang salah satunya melalui pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten. Sebagai langkah awal, komite ini berhasil memetakan penduduk/keluarga miskin di wilayah ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan memiliki jumlah penduduk miskin yang bervariasi dari rendah hingga tinggi (Tabel 1.2). Dalam Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah penduduk atau keluarga miskin di Kecamatan Bayat jumlahnya cukup menonjol meskipun bukan merupakan yang tertinggi. Disamping jumlah penduduk miskin yang cukup besar, PDRB per kapita Kecamatan Bayat merupakan PDRB paling rendah diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten.

Tabel 1.2. Penduduk (Keluarga) Miskin Kabupaten Klaten 2004

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
1.	Kemalang	13.606	32.7153	5.843	21.242	64,86
2.	Trucuk	18.655	75.341	10.164	40.689	54,01
3.	Bayat	16.099	61.556	8.194	31.095	50,51
4.	Gantiwarno	9.960	38.276	4.902	18.911	49,41
5.	Karangnongko	9.239	37.378	4.355	17.047	45,61
6.	Ngawen	10.349	42.627	4.872	17.647	41,40
7.	Karanganom	11.845	47.013	5.168	18.086	38,47

8.	Kalikotes	8.310	33.083	3.554	12.682	38,33
9.	Jogonalan	15.232	55.200	5.713	20.871	37,81
10.	Jatinom	11.848	56.760	5.604	20.335	35,65
11.	Kebonarum	5.189	21.152	1.976	7.370	34,84
12.	Manisrenggo	10.481	41.197	4.261	14.024	34,04
13.	Wedi	13.570	53.592	5.230	17.512	32,68
14.	Wonosari	13.418	58.175	5.754	18.878	32,45
15.	Tulung	12.687	54.596	4.791	16.803	30,78
16.	Prambanan	11.198	46.605	3.533	13.964	30,03
17.	Karangdowo	13.077	49.636	3.856	13.800	27,80
18.	Pedan	11.774	47.875	3.081	12.831	26,80
19.	Ceper	20.854	63.447	5.697	16.896	26,63
Lanjutan Tabel 1.2						
No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
20.	Cawas	16.529	64.691	5.337	16.116	24,91
21.	Klaten Selatan	11.280	40.130	2.837	8.803	21,94
22.	Polanharjo	10.659	41.747	2.188	7.321	17,54
23.	Delanggu	11.195	43.772	2.279	7.763	17,53
24.	Juwiring	14.935	60.655	4.330	10.229	16,86
25.	Klaten Utara	10.928	42.523	1,954	6.640	16,62
26.	Klaten Tengah	12.480	43.349	1.991	6.155	14,20

Sumber: Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten.

Persentase jumlah keluarga miskin yang ada di Kecamatan Bayat untuk setiap desa relatif tinggi seperti terlihat dalam Tabel 1.3.. Kondisi wilayah yang tandus, pertanian lahan sempit (prtani gurem) dan lokasinya yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyebabnya. Dari desa-desa di Kecamatan Bayat, Desa Bogem mempunyai persentase penduduk atau keluarga miskin tertinggi ketiga di antara desa-desa lainnya.

Tabel 1.3. Penduduk (Keluarga) Miskin Kecamatan Bayat 2004

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
1.	Jotangan	626	2.743	485	2.509	91,47
2.	Gunung Gajah	1.026	3.329	440	3.010	90,63
3.	Bogem	516	2.129	464	1.911	89,76

4.	Jarum	763	2.792	496	1.181	65,11
5.	Beluk	456	1.883	307	1.086	57,67
6.	Nengahan	436	1.507	216	859	57,00
7.	Wiro	1.139	4.459	660	2.398	53,78
8.	Krikilan	517	1.961	252	1.043	53,19
9.	Ngerangan	1.551	6.182	732	2.994	48,43
10.	Paseban	1.404	4.722	734	2.136	45,24
11.	Tawangrejo	526	2.074	271	921	44,41
12.	Jambakan	689	2.685	233	1.104	41,12
13.	Kebon	652	2.451	296	982	40,07
14.	Krakitan	2.298	8.904	743	3.551	39,88
15.	Dukuh	768	3.340	439	1.255	38,73
Lanjutan Tabel 1.3						
No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
16.	Tegalrejo	887	3.091	299	1.090	35,26
17.	Banyuripan	781	3.352	272	1.182	35,26
18.	Talang	1.064	4.062	355	1.246	30,67

Sumber: Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, kiranya menarik untuk dilakukan studi tentang “Analisis Determinan dan Program-program Pengentasan Kemiskinan dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Reforma Agraria”. Berdasarkan data kemiskinan penduduk (Tabel 1.1, 1.2, 1.3) tersebut di atas lokasi untuk melaksanakan studi dipilih Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur rumahtangga petani menurut tingkat kemiskinannya di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

3. Bagaimana kombinasi luas penguasaan pemilikan tanah minimal dan jenis penggunaan tanah pertanian yang diperlukan dalam pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
4. Apa macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk rumahtangga petani miskin di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten..
5. Apa kebijakan reforma agraria yang ada dan bagaimana pelaksanaannya di desa Bogem, serta bagaimana menggunakan informasi tentang keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, struktur penguasaan-pemilikan tanah dan penggunaan tanah, pendapatan petani, program-program pengentasan kemiskinan, serta struktur kemiskinan rumahtangga petani dalam merancang usulan kebijakan reforma agraria dalam rangka pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di tingkat desa.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui struktur rumahtangga petani menurut tingkat kemiskinannya di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
2. mengetahui jenis dan besar peran faktor-faktor dalam mempengaruhi kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
3. mengetahui kombinasi antara luas minimal penguasaan pemilikan tanah dan jenis penggunaan tanah pertanian yang mampu mengentaskan kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

4. mengetahui macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam mengurangi jumlah rumahtangga petani miskin di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
5. mengetahui kegiatan reforma agraria yang telah dilaksanakan dan keberhasilannya di Desa Bogem Kecamatan Bayat, serta mencoba menggunakan informasi tentang keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, struktur penguasaan-pemilikan tanah dan macam usahatani pertanian, program-program pengentasan kemiskinan, serta struktur kemiskinan rumahtangga petani untuk merancang usulan kebijakan reforma agraria dalam rangka pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di tingkat desa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam bidang akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hubungan antara kemiskinan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi (determinan kemiskinan), struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah pertanian, pendapatan petani, serta macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan.

Dalam bidang pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan arahan kebijakan reforma agraria dalam pengentasan kemiskinan rumahtangga petani secara *bottom up* berbasis struktur kemiskinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, struktur penguasaan dan pemilikan tanah, penggunaan tanah dan implementasi program-program pengentasan kemiskinan pemerintah yang lain dalam satuan wilayah desa.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan tema bahasan program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh peneliti/tim peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan terhadap suatu program dengan cakupan wilayah yang luas (propinsi, pulau bahkan seluruh wilayah Indonesia). Penelitian oleh Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 melakukan penelitian terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran yang terdiri dari program IDT, PPK, dan P2KP di Propinsi Yogyakarta. Penelitian dilakukan terhadap manfaat program yang terdiri dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, efisiensi penyaluran program dan kelangsungan dana yang bergulir di masyarakat.

Penelitian juga dilakukan oleh Tim Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan OPK Beras tahun 2000 dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap manfaat yang diterima keluarga sasaran, dan evaluasi pelaksanaan OPK yang meliputi ketepatan sasaran, ketepatan kuantitas dan kualitas, ketepatan waktu dan tempat distribusi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan OPK, dan evaluasi dampak program OPK.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Arti Dyah Woroutami dari staf Bappeki Departemen Keuangan pada tahun 2000 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Program Bea Siswa dengan cakupan wilayah Pulau Jawa. Penelitian dilakukan terhadap penyaluran dana beasiswa dan mengukur tingkat efektivitas atau kesalahan sasaran. Penelitian oleh Tim Studi Kajian Kemiskinan Partisipatoris (KKP) Smeru tentang program-program penanggulangan kemiskinan digali dari kelompok masyarakat miskin di 19 desa yang dilakukan secara acak di seluruh

Indonesia. Penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang mereka terima dan komentar mereka terhadap program-program tersebut.

Penelitian tentang "Analisis Determinan dan Program Pengentasan Kemiskinan Rumah tangga Petani Dalam Mendukung Arah Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mengatasi Kemiskinan Petani "ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten dengan studi di Desa Bogem Kecamatan Bayat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan rumah tangga petani dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah pertanian, pendapatan petani, serta macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah termasuk reforma agraria, yang diakhiri dengan pemanfaatan informasi tersebut dalam membantu merancang alternatif kebijakan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan berbasis rumah tangga petani di tingkat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka rencana penelitian tentang determinan dan program-program kemiskinan yang akan dilakukan ini asli dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dalam hal cakupan isi kajian, instrumen penelitian, kedalaman kajian, maupun cakupan wilayah kajiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan dan Program-Program Pengentasan Kemiskinan

2.1.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya berkaitan dengan ketidak-mampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko,1997:137). Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidak-mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan serta informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam Ridlo(2001:8)).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993:201-204).

Tinjauan yang sama dengan penjelasan berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri (2004:165-166). Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah, sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003:25) memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan

minimum tertentu. Ketidak-merataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidak-mampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

Uraian mengenai definisi kemiskinan di atas menggambarkan bahwa secara kualitatif, kemiskinan merupakan keadaan ketidak-mampuan penduduk untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup pada standar layak meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, yang keadaan ini tidak dikehendaki oleh si miskin itu melainkan karena ketidak-berdayaannya dan ketidak-berhasilannya dalam mengelola dan mengakses aset yang ada di dalam dirinya dan aset yang ada di lingkungannya. Aset dalam diri si miskin meliputi kemampuan fisik dan intelektualnya (SDM), sedangkan aset di lingkungan si miskin meliputi ketersediaan input-input produksi, campur tangan sosial dan pemerintah (pembangunan). Keadaan semacam itu harus dicari jalan keluarnya dan dapat diawali mulai dari kajian-kajian yang mengaitkan antara fakta kemiskinan, potensi desa meliputi struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, program-program bantuan pengentasan pengiskinan, serta kegiatan reforma agraria.

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan

struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004:167-168; Soegijoko, 1997:137; dan Nasution, 1996: 48-50).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama* kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidak berdayaan masyarakat, dan *kedua* kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004:1-6) berupa: (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan berupa rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena ketidak-berdayaan mereka; dan (4) Kemiskinan karena faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Sharp *et. al.* dalam Kuncoro (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan

sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan (Tim Studi KKP, 2004).

Sahdan (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di desa yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

Berdasarkan uraian tentang penyebab kemiskinan di atas dapat ditarik benang merah bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya kemiskinan rumahtangga petani di desa adalah (a) kualitas sumberdaya manusia, (b) modal termasuk lahan, (c) potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, (d) sikap hidup konsumtif dan tidak produktif, (e) lapangan kerja, dan (f) inovasi usahatani. Lima faktor tersebut yang selanjutnya akan dikaji pengaruhnya terhadap kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem.

2.1.1.3 Jenis, Indikator dan Ukuran Kemiskinan

2.1.1.3.1 Jenis Kemiskinan

Jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ridlo (2001:11), menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakann daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya (Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001:10)) Kemiskinan absolut keberadaannya masih dapat dihilangkan (*poverty alleviation*), sedangkan kemiskinan relatif keberadaannya tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya (*poverty reduction*)(Soegijoko,1997:138).

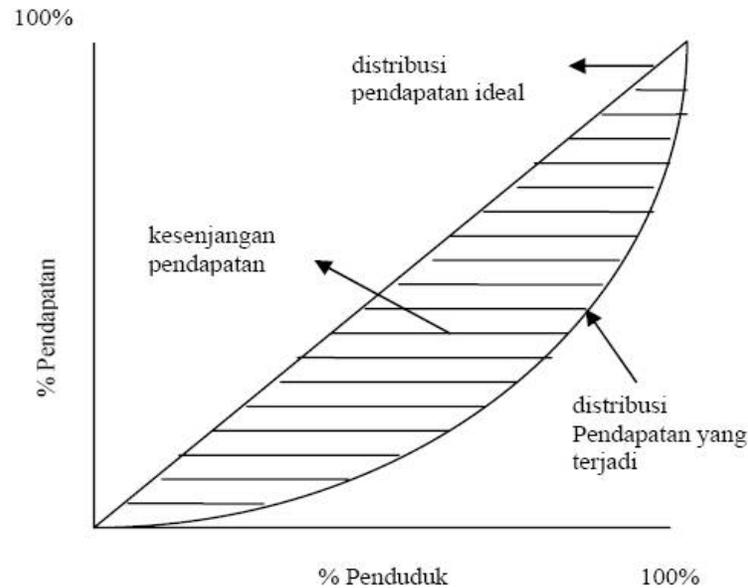
2.1.1.3.2 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan secara umum dikategorikan ke dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kategorisasi kemiskinan tersebut didasarkan pada perbedaan

indikator dan cara pandang penilaian kemiskinan. Oleh karena itu, indikator kemiskinan dan cara pandang penilaian kemiskinan menjadi penting untuk diperhatikan dalam rangka mengkaji tentang kemiskinan.

Kemiskinan relatif menunjukkan ketidak-merataan pendapatan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kelompok atau satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain. Bank Dunia menggunakan ukuran ketidak-merataan sebagai berikut: (a) Tingkat ketidak-merataan tinggi bila 40% penduduk terbawah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan, (b) Tingkat ketidak-merataan sedang bila menerima antara 12 - 17%, (c) . Tingkat ketidak-merataan rendah bila menerima lebih dari 17% (Rusli dkk., 1995:15).

Pengukuran yang lain dengan menggunakan Kurva Lorenz (Gambat 2.1). Kurva ini merupakan diagram yang memperlihatkan hubungan antara persentase penduduk dengan porsi pendapatan yang mereka terima. Dalam kondisi ideal setiap persentase pendapatan dinikmati oleh penduduk dengan persentase yang sama. Hasil Kurva Lorenz kemudian dijumlahkan dengan memberi densitas relatif ketidak-merataan distribusi pendapatan yang disebut *Gini Ratio*. Pembagian kelas dapat menjadi tiga kelas (miskin, menengah dan kaya) atau lima kelas (termiskin, kedua, ketiga, keempat dan terkaya). Angka *Gini Ratio* 0 (nol) menunjukkan merata mutlak, sedangkan angka 1 (satu) menunjukkan tidak merata mutlak (Remidan Herijanto, 2002:41; Rusli dkk, 1995:12; dan Widodo, 1990:118).



Gambar 2.1. Kurva Lorentz (Remi dan Herijanto, 2002:41; Rusli, dkk., 1995:12; Widodo (1990:118).

Kemiskinan absolut merupakan refleksi dari ketidak-mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Seorang yang dikatakan miskin secara absolut jika tingkat pendapatannya lebih rendah dari standar kemiskinan yang ditetapkan. Saat ini sudah cukup banyak ukuran dan standar yang dikeluarkan oleh pakar lembaga mengenai batas garis kemiskinan. Contoh-contoh indikator kemiskinan yang selama ini telah dicoba penerapannya adalah indikator kemiskinan menurut Sayogyo (1976), Departemen Dalam Negeri (1976), BPS (1993), Both (1993), Supriatna (2000), Mubyarto (2002), BKKBN (2003), dan Bappenas (2004).

Menurut Sajogyo *dalam* Quibria (1996: 113) batas garis kemiskinan ditunjukkan oleh pendapatan perkapita setara dengan 320 kg beras per tahun untuk pedesaan dan setara dengan 480 kg beras per tahun untuk perkotaan.

Lebih lanjut Sajogyo mengklasifikasikan kemiskinan pedesaan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) Rumah tangga paling miskin jika pendapatan perkapitanya di bawah

180 kilogram Beras per tahu, (2) Rumah tangga miskin sekali, jika pendapatan perkapitanya setara dengan 180 kilogram - 120 kg beras per tahun, dan Rumah tangga miskin, jika pendapatan perkapitanya setara dengan 240 kilogram - 320 kilogram beras per tahun.

Dengan menggunakan batas garis kemiskinan tersebut akan dapat diketahui jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Simatupang (1991: 23) dengan menggunakan standar Sayogyo tersebut pada tahun 1990 ditemukan sebanyak 38 juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Batas kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik (1993: 23) ditunjukkan oleh pendapatan perkapita per hari Rp.27.905 untuk perkotaan dan Rp.18.244,- untuk pedesaan. Dengan menggunakan kriteria ini pada tahun 1993 ditemukan sebanyak 25,9 juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Batas garis kemiskinan Biro Pusat Statistik didasarkan kepada kebutuhan kalori minimum perhari yaitu 2100 kalori ditambah dengan kebutuhan non makan seperti pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain Both (1993: 24) menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan konsumsi kalori per hari sebanyak 2000 kalori dan 40 gram protein. Djoyohadikusumo (1996: 21) menggunakan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita per tahun adalah US\$50 untuk pedesaan dan US\$ 75 untuk perkotaan. Standar yang dikemukakan Djoyohadikusumo relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar kemiskinan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik apalagi dengan standar Sajogyo. Dengan menggunakan standar Djoyohadikusumo, berarti jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode yang sama cenderung lebih banyak.

Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Agraria dalam Nawi (1997: 12) adalah berdasarkan konsumsi sembilan bahan kebutuhan pokok yang dihitung atas

dasar harga setempat. Standar kebutuhan minimum per orang per tahun: 100 kg beras, 60 liter minyak tanah; 15 kg ikan asin; 20 batang sabun; 6 kg gula pasir; 4 meter tekstil kasar; 6 kg minyak goreng; 2 meter batik kasar; 4 kg garam.

1. Klasifikasi kemiskinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Agraria adalah sebagai berikut: Miskin sekali, jika konsumsi perkapita pertahun sebesar 75% dari nilai total Konsumsi sembilan bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan;
2. Miskin, jika konsumsi perkapita pertahun sebesar 75% -125% dari nilai total konsumsi sembilan bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan;
3. Hampir miskin, jika konsumsi perkapita pertahun sebesar 125% -200% dari nilai total konsumsi sembilan bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan.

Di sisi lain Bank Dunia (1990: 36) untuk standar internasional memberikan batas garis kemiskinan yang lebih tinggi dari standar-standar lainnya yaitu dengan pendapatan perkapita sebesar US\$ 275 per tahun. Dengan menggunakan kriteria tersebut pada tahun 1990 di India ditemukan sebanyak 250 juta rakyat berada di bawah garis kemiskinan, di Cina 80 juta, di Amerika Latin 50 juta dan di seluruh negara berkembang ditemukan sebanyak 633 juta jiwa rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Mubyarto (2002) berpendapat bahwa penduduk miskin bukanlah orang yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi memiliki serba sedikit modal sosial untuk mengembangkan diri. Masyarakat perdesaan mengenali penduduk miskin dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan kepemilikan tanah atau ternak. Sedangkan masyarakat perkotaan lebih melihat jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan dan kondisi kehidupan sehari-hari (Tim Studi KKP, 2004).

Indikator kemiskinan yang dikemukakan BKKBN (2003:25) adalah bahwa untuk keluarga pra sejahtera terdiri dari: (a) seluruh anggota keluarga tidak bisa makan dua kali

sehari atau lebih; tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian; (b) bagian lantai terluas dibuat dari tanah. Sedangkan indikator kemiskinan untuk keluarga sejahtera I terdiri dari: (a) seminggu sekali keluarga tidak selalu dapat makan daging/ikan/telur; (b) belum tentu setahun sekali anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru; (c) lantai rumah kurang dari 8 m² untuk tiap penghuni.

Indikator kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Bappenas (2004) dalam Sahdan (2005) berupa: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidak berdayaan atau daya tawar yang rendah; dan (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Sedangkan menurut BPS (2003:580) garis kemiskinan adalah besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Berdasarkan kriteria kemiskinan menurut BPS (2003) tersebut, maka garis kemiskinan di Indonesia nilainya selalu berubah tiap tahunnya seperti terlihat dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Garis kemiskinan di Indonesia

No.	Tahun	Pengeluaran Rupiah per kapita per bulan	
		Kota	Desa
1.	1996	42.032	31.366

2.	1998	96.956	72.780
3.	1999	92.409	74.272
Lanjutan Tabel 1.4			
No.	Tahun	Pengeluaran Rupiah per kapita per bulan	
		Kota	Desa
4.	2000	91.632	73.649
5.	2001	100.011	80.382
6.	2002	130.499	96.512
7.	2003	138.803	105.888

Sumber: BPS (2003).

Indikator kemiskinan dapat juga ditunjukkan pada suatu wilayah (desa). Menurut Supriatna (2000:70) indikator kemiskinan tingkat desa adalah pendapatan perkapita wilayah yang rendah, persentase rawan gizi yang tinggi, umur harapan hidup yang rendah, rata-rata tingkat pendidikan rendah.

Menurut Departemen Dalam Negeri kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan wilayah pada tingkat kecamatan, yaitu (a) Kecamatan miskin sekali apabila pendapatan per kapita penduduk di bawah 75% dari kebutuhan hidup minimum; (b) Kecamatan miskin apabila pendapatan per kapita penduduk 25% di bawah, tepat dan 25% di atas kebutuhan hidup minimum; (c) Kecamatan hampir miskin apabila pendapatan per kapita penduduk di atas 25% kebutuhan hidup minimum sampai mencapai kebutuhan hidup sekunder (200%). Kecamatan tidak miskin apabila pendapatan per kapita penduduk melebihi kebutuhan hidup keduanya (Rusli dkk., 1995:8).

Berdasarkan uraian tentang jenis kemiskinan di atas, maka keadaan kemiskinan dapat didekati dari sudut pandang (a) bandingannya dengan suatu ukuran tertentu (kemiskinan absolut) atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya (kemiskinan relatif), (b) bandingannya dengan garis kemiskinan atau kondisi-kondisi tertentu yang

mencerminkan situasi kemiskinan (kemiskinan absolut), (c) sifat terjadi dan lama berlangsungnya kemiskinan meliputi *Persistent poverty* (kemiskinan kronis dan turun temurun), *Cyclical poverty* (kemiskinan bersiklus), *Seasonal poverty* (kemiskinan musiman), dan *Accidental poverty* (kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan).

Menurut uraian di atas, kriteria jenis kemiskinan absolut dinilai peneliti lebih relevan jika digunakan untuk mengklasifikasikan struktur kemiskinan rumahtangga petani di lokasi penelitian karena dalam kategorisasi kemiskinan absolut telah tersedia standar yang jelas untuk memilahkan rumahtangga petani miskin dari yang tidak miskin berdasarkan ambang garis kemiskinan berbasis pendapatannya. Contoh standar untuk menentukan ambang garis kemiskinan tersebut misalnya menurut Sayogyo (1976), Dirjen Agraria (1976), BPS (1986), dan Bank Dunia (1990).

2.1.1.4 Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya (Kementrian Kokesra, 2004:III.1). Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan

dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Soegijoko,1997:148).

Strategi pengentasan kemiskinan dari Bank Dunia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an menekankan pada pembangunan fisik dan prasarana sebagai alat utama pembangunan. Pada tahun 1970-an menekankan pada kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1980-an berupaya meningkatkan pendapatan rakyat miskin. Tahun 1990-an strateginya berupa redistribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar (2001: 6). Selanjutnya agenda kemiskinan terbaru Bank Dunia adalah: 1) Membuka kesempatan ekonomi kepada golongan miskin dengan melalui program padat karya dan meningkatkan produktivitas usaha kecil dan petani kecil; 2) Investasi sumber daya manusia terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan; 3) Pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian. (Mikkelsen,2003:1997).

Strategi pengentasan kemiskinan juga dikemukakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (Unescap)* (2000), bahwa strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari penanggulangan kemiskinan uang; kemiskinan akses ekonomi, sosial dan budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan informasi.

Strategi memerangi kemiskinan menurut Gunnar Adler Karlsson dalam Ala (1981:31) meliputi (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki

dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat (Nugroho dan Dahuri, 2004:165).

Upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijaksanaan langsung ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijaksanaan khusus untuk menyiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung atas kelancaran program (Soegijoko, 1997:148).

Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin. Kebijakan tersebut menurut Remi dan Herijanto (2002:29) didasari kebutuhan untuk menutupi penurunan daya beli penduduk akibat krisis ekonomi.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Sepanjang kebijakan pemerintah belum dapat

mengatasi kemiskinan, masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi kemiskinannya dengan cara: berhutang pada berbagai sumber pinjaman informal, bekerja serabutan, istri dan anak turut bekerja, memanfaatkan sumber daya alam disekelilingnya, bekerja di luar daerah, dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti jenis makanan dan mengatur keuangan (Tim Studi KKP, 2004).

Uraian tentang strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan di atas menggambarkan berbagai strategi pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh strategi yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Selanjutnya, strategi dan program kemiskinan juga telah ditempuh oleh pemerintah, yaitu mengusahakan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar serta pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan dimaksud, meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin dan menciptakan sistem jaminan sosial untuk melindungi penduduk miskin tersebut. Disamping strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Bank Dunia maupun pemerintah tersebut ternyata penduduk miskin juga mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji macam-macam program kemiskinan yang telah dilaksanakan di Desa Bogem Kecamatan Bayat serta manfaatnya bagi rumahtangga petani dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan.

2.1. 2 Distribusi Penguasaan Tanah dan Pendapatan Petani

Sampai dengan tahun 2007 Indonesia memiliki penduduk sebanyak 224,3 juta jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 37,17 juta atau 16,58% jumlah penduduk. Sebanyak 23,61 juta jiwa dari 37,17 juta jiwa penduduk miskin tersebut berada di perdesaan yang umumnya menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian dan memerlukan tanah untuk bercocok tanam (BPS, 2007). Eronisnya menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (TPKRI) di Indonesia masih terdapat 13,253 juta rumahtangga petani gurem yang menguasai tanah (yang belum tentu memiliki) kurang dari 0,5 ha (<http://www.bitra.or.id>, 13 Oktober 2008).

Hal ini merupakan hasil proses sosial ekonomi penguasaan pemilikan tanah yang panjang akibat fragmentasi tanah pertanian baik melalui pewarisan maupun peralihan hak atas tanah yang lain termasuk jual-beli. Fenomena ini tentu sangat erat kaitannya dengan peningkatan jumlah penduduk sebagai fungsi ruang dan waktu yang membutuhkan tanah untuk berbagai aspek kehidupan.

Distribusi penguasaan tanah sebagai faktor produksi dan distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi tanah pertanian dan pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Umpamanya jika sekelompok masyarakat proporsinya sebesar 40% dari total penduduk, maka seharusnya mereka juga menguasai pendapatan sebesar 40% dari total pendapatan.

Untuk mengukur distribusi atau tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain *Gini Ratio*, *Kuznet Index*, *Oshima Hindex*, *Theil Decomposition* dan kriteria Bank Dunia. Dari beberapa pendekatan tersebut *Gini Ratio* dan kriteria Bank Dunia merupakan ukuran tingkat pemerataan yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Di Indonesia kedua pendekatan tersebut telah lazim digunakan untuk mengukur berbagai bentuk pemerataan, terutama untuk mengukur pemerataan pendapatan dan penguasaan tanah. Todaro

(1985: 149) menyatakan bahwa *Gini Ratio* akan dapat dijelaskan dengan menggunakan *Kurva Lorenz*. Dengan menggunakan *Kurva Lorenz* tingkat pemerataan akan dapat diketahui dengan jalan membandingkan bidang yang terletak antara garis diagonal dengan *Kurva Lorenz* (bidang yang diarsir) pada Gambar 2.1.

Di pedesaan distribusi penguasaan tanah dan distribusi pendapatan merupakan dua hal yang cenderung menjadi perhatian, karena distribusi penguasaan lahan cenderung mempengaruhi distribusi pendapatan. Lahan bagi masyarakat pedesaan merupakan faktor produksi yang menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Dengan demikian jika lahan terdistribusi dengan merata, maka pendapatan juga akan terdistribusi pula secara merata.

Secara lebih luas Johnston dan Clark (1985: 210) mengemukakan luas dan distribusi penguasaan tanah serta pilihan teknologi berpengaruh terhadap tingkat dan distribusi pendapatan masyarakat. Seterusnya tingkat dan distribusi pendapatan dan keputusan untuk menabung dan investasi berpengaruh pula terhadap tingkat dan distribusi penguasaan lahan. Selanjutnya hasil studi Mintoro (1983: 45) menyimpulkan bahwa pada desa-desa yang kesempatan kerja di luar pertanian sangat terbatas, distribusi penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan. Sedangkan bagi desa-desa yang kesempatan kerja di luar pertanian sudah terbuka, distribusi penguasaan lahan tidak berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan. Terbukanya kesempatan berusaha di luar pertanian menunjukkan bahwa penghasilan petani bukan hanya berasal dari sektor pertanian tetapi juga berasal dari kegiatan lain dengan demikian penguasaan lahan bukan satu-satunya sumber penghasilan bagi petani dan yang menentukan distribusi pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 1990 dapat diketahui bahwa rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga di Indonesia 0,38 hektar sementara sebarannya cukup

merata sebagaimana ditunjukkan oleh Gini Koefisien (0,3213). Todaro (1985: 306) menyatakan di kebanyakan negara yang struktur kepemilikan tanahnya tidak merata merupakan penyebab utama ketidak-merataan pembagian pendapatan dan kesejahteraan di pedesaan. Hal yang sama juga diungkapkan Syahrudin (1980: 36) bahwa terdapat hubungan yang berarti antara distribusi kepemilikan tanah dengan distribusi pendapatan di pedesaan Sumatera Barat.

Hasil studi deskriptif yang dilakukan Hayami (1981: 46) di Desa Perbaungan menyimpulkan bahwa luas kepemilikan tanah yang tidak merata menyebabkan besarnya pendapatan juga tidak merata. Tidak meratanya distribusi pendapatan disebabkan kegiatan pertanian merupakan satu-satunya pendapatan bagi masyarakat. Hasil studi deskriptif yang dilakukan Hayami (1981: 46) di Desa Perbaungan menyimpulkan bahwa luas kepemilikan lahan yang tidak merata menyebabkan besarnya pendapatan juga tidak merata. Tidak meratanya distribusi pendapatan disebabkan kegiatan pertanian merupakan satu-satunya pendapatan bagi masyarakat.

Colier *dalam* Hayami (1985: 280) mengemukakan bahwa pendapatan dari kegiatan di luar pertanian sangat penting sebagai tambahan pendapatan yang bersumber dari kegiatan pertanian. Selanjutnya, ia mengemukakan, pendapatan dari kegiatan non pertanian dalam perekonomian agraris secara teoritis dapat berpengaruh positif terhadap pemerataan pendapatan jika pola penguasaan lahan pertanian relatif tidak merata. Berpengaruh negatif jika pola penguasaan lahan relatif merata dan netral jika sumbangan penghasilan kegiatan luar pertanian relatif kecil terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

Hasil studi yang dilakukan Sinaga dan White (1984: 145) di daerah aliran sungai Cimanuk memperlihatkan semakin besar proporsi pendapatan dan kegiatan non pertanian

tidak memperkecil pemerataan tetapi sebaliknya memperbesar ketidakmerataan pendapatan yang berasal dari pertanian. Lebih lanjut studi tersebut menemukan golongan petani yang berlahan luas dan memperoleh pendapatan melebihi biaya hidupnya, mereka menginvestasikan surplus pendapatannya kepada usaha yang bersifat padat modal seperti alat pengolah hasil pertanian dan membuka warung. Di lain pihak petani kecil dan buruh tani yang penghasilannya tidak cukup untuk membiayai keluarganya, mereka terpaksa mencari pekerjaan yang bersifat padat tenaga kerja yang tidak membutuhkan modal besar seperti pedagang bakulan, kerajinan tangan, bidang jasa dan sektor informal lainnya.

Studi yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dalam Kustiah (1983: 77) menyimpulkan bahwa semakin miskin suatu daerah maka semakin merata distribusi pendapatannya dan demikian pula sebaliknya. Terjadinya hal tersebut karena kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat miskin pada umumnya adalah pertanian berlahan sempit dan cenderung mengandalkan tenaga kerja ketimbang modal. Penggunaan tenaga kerja di luar keluarga pada umumnya tidak dibayar karena adanya pertukaran tenaga kerja di antara mereka secara resiprokal. Berbeda dengan petani yang berlahan luas yang pada umumnya lebih mengandalkan faktor modal dan tenaga kerja bayaran dengan berprinsip efisiensi skala usaha. Dengan kondisi demikian pembagian pendapatan pada kelompok petani miskin cenderung akan lebih merata ketimbang petani mampu. Secara konkrit hasil studi tersebut menunjukkan bahwa besarnya koefisien Gini untuk daerah hampir miskin sebesar 0,270 daerah miskin sebesar 0,234, daerah sedikit lebih miskin 0,213 dan daerah sangat miskin 0,161.

2.1. 3 Reforma Agraria

Dalam era BPNRI ini banyak perubahan mendasar yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan peran instansi pemerintah ini dalam kiprah pembangunan nasional, salah satunya adalah program reforma agraria. Dalam kerangka itu, maka reforma agraria harus dipahami bukan hanya sebagai kebijakan tentang distribusi tanah (*land reform*), melainkan juga sebagai proses yang lebih luas (*agrarian reform*) yang meliputi akses terhadap sumber-sumber alam (tanah, air, tanaman dalam kasus para penyadap, dsb), terhadap dana, teknologi, barang-barang dan pasar tenaga kerja serta secara khusus terhadap distribusi kekuatan politik (Rosset *et al.*, 2008: 301).

Reforma agraria yang dimaksudkan adalah *land reform plus*, yang meliputi *land reform* dan *access reform* sebagai perwujudan dari pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Pelaksanaan *land reform* dimaksudkan untuk menata P4T melalui redistribusi tanah yang telah diatur dalam PP 224 Tahun 1961. Sementara itu, *access reform* dimaksudkan untuk membuka akses rakyat pada sumber-sumber ekonomi dan mencegah beralihnya lahan kepada pihak lain. Secara garis besar ada empat (4) lingkup kegiatan utama dalam PPAN, yaitu:

1. *Penetapan obyek tanah.* Obyek reforma agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut petaturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria. Tanah obyek reforma agraria yang demikian dapat berasal dari: (a) tanah absentee, (b) tanah kelebihan maksimum, (c) tanah yang haknya telah berakhir, (d) tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan SK pemberian haknya, (e) tanah yang terlantar secara fisik dan hukum, dan (f) tanah bekas kawasan hutan. Dalam rangka reforma agraria ini pemerintah berencana mengalokasikan 9,25 juta hektar tanah. Tanah seluas itu terdiri dari 8,15 juta hektar berasal dari tanah hutan produksi konversi dan 1,1 juta hektar lainnya berasal dari

sumber lain

2. *Penetapan Subyek*. Subyek reforma agraria adalah petani penerima manfaat reforma agraria/tanah redistribusi yang diatur syarat dan prioritasnya berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu: kependudukan, sosial ekonomi, dan penguasaan tanah.
3. *Mekanisme delivery subject-object*. Mekanisme ini dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) model yaitu: (a) mendekatkan tanah ke subyek, (b) mendekatkan subyek ke lokasi obyek, dan (c) subyek dan obyek berada pada lokasi yang sama.
4. *Access Reform*. Dilaksanakan antara lain melalui penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat, dukungan permodalan, dukungan distribusi, pemasaran dan lain-lain.

Dalam kerangka kajian peran reforma agraria dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga petani, kiranya perlu pengetahuan tentang kelebihan *land reform* dan *access reform* ini. Menurut Rahmawati (2009), contoh kelebihan yang ditunjukkan oleh *land reform* dan *access reform* ini adalah (a) mengubah petani dari tidak bertanah menjadi petani bertanah dan menambah luas tanah petani yang telah memiliki tanah, (b) secara otomatis terjadi penataan struktur penguasaan pemilikan tanah, penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan pangan, (c) menghindari dan mengurangi terjadinya sengketa dan konflik penguasaan pemilikan tanah karena terbitnya sertipikat tanah sebagai legalisasi tanah, dan (d) terbukanya akses petani kepada sumber-sumber produksinya dengan cara memperoleh modal usahatani dengan menjaminkan sertipikat tanah ke Bank.

Selanjutnya Rahmawati (2009) juga melaporkan bahwa *land reform* dan *access reform* memiliki kelemahan antara lain:

- a. Timbulnya permasalahan pertanahan yang baru jika *land reform* tidak ditindaklanjuti dengan *access reform*. Ketiadaan *access reform* dapat menyebabkan petani penerima redistribusi tanah tidak mampu mengelola tanahnya karena tidak adanya permodalan usahatani. Petani menjadi lebih memilih alternatif untuk menjual tanahnya ketimbang mengolah tanahnya, sehingga menyebabkan bertambahnya penduduk tidak bertanah dan kemiskinan.
- b. Masih banyaknya instansi pemerintah lain di luar BPN yang belum siap berpartisipasi dalam pelaksanaan *land reform* dan *access reform* sebagai program pemerintah untuk penduduk miskin. Setelah memperoleh tanah redis dan sertifikatnya, program PPAN ini akan berhasil jika instansi pemerintah lainnya mendukung melalui *access reform* misalnya melalui pinjaman permodalan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, bantuan bibit dan pupuk dari Dinas Pertanian, perbaikan irigasi dari Dinas PU, dll.

Oleh karena itu, Rahmawati (2009) lebih lanjut mengemukakan bahwa ke depan PPAN yang implementasinya melalui reforma agraria (*land reform* dan *access reform*) ini diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan yang harus dicari jalan penyelesaiannya meliputi: (a) ketersediaan dan alokasi dana, (b) ketersediaan data pertanahan, (c) penyediaan tanah obyek redistribusi, (d) penertiban administrasi pasca redistribusi, (e) keberadaan dan fungsi lembaga pengawasan, (f) adanya komitmen seluruh lembaga, dan (g) perlunya sosialisasi *land reform* dan *access reform* yang terus menerus baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemerintah yang lain.

Berdasarkan uraian tentang reforma agraria di atas dapat dikemukakan bahwa melalui *land reform* dan *access reform* BPNRI secara bersama-sama dengan instansi pemerintah yang lain berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang

terjadi di dalam masyarakat. Terkait dengan keagrarian Indonesia, maka konteks pendekatan penyelesaian kemiskinan dari sektor pertanian menjadi lebih relevan, begitupula diperlukan pengkajian reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis rumahtangga petani. Selanjutnya, mengingat pertanian ada di perdesaan, maka kajian implementasi kebijakan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan perlu didasarkan pada basis desa. Selanjutnya, aspek-aspek kajian yang terkait dengan reforma agraria di desa perlu ditekankan pada: (a) keadaan rumahtangga petani dalam hal penguasaan pemilikan sumberdaya alam meliputi tanah, penggunaan tanah dan air termasuk di dalamnya program sertifikasi tanah dan (b) keadaan rumahtangga petani dalam hal aksesnya terhadap sumberdaya lainnya meliputi sumber-sumber permodalan, tenaga kerja, peluang usaha, bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun non pemerintah termasuk program-program pengentasan kemiskinan, dan pemasaran produk-produk pertanian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 . Teori Produksi

Produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input atau jumlah output per unit input. Produktivitas dapat digunakan sebagai ukuran keragaan relatif dari perbedaan antar industri, perusahaan atau perekonomian (Jamison and Lau, 1982; Samuelson and Nordhaus, 2001). Dalam proses produksi pertanian, lahan merupakan salah satu input yang penting sehingga produktivitas lahan sering digunakan sebagai ukuran keragaan suatu usahatani. Produktivitas lahan adalah jumlah output per unit luas lahan.

Produksi merupakan suatu proses yang mengubah faktor-faktor (input) menjadi suatu produk (output). Tinggi rendahnya produksi tergantung pada keputusan petani, berapa jumlah sumberdaya (input) yang akan digunakan, berapa luas tanah yang dipakai, berapa banyaknya bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja dan lain-lain. Hubungan kuantitatif antara input dan output disebut dengan fungsi produksi, sedangkan analisis dan pendugaan hubungan itu disebut analisis fungsi produksi (Soekartawi, 1994). Bishop dan Toussaint (1986), menyatakan bahwa fungsi produksi adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan bahwa jumlah hasil produksi tertentu tergantung pada jumlah input tertentu yang digunakan. Jadi suatu fungsi produksi memberikan keterangan mengenai jumlah output yang mungkin diharapkan apabila input tertentu dikombinasikan dalam suatu cara yang khusus.

Konsep dasar yang digunakan untuk analisis produktivitas adalah fungsi produksi (Jamison and Lau, 1982). Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas identik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah input yang diperlukan dan jumlah output yang dapat diperoleh (Pindyck and Rubinfeld, 2001; Samuelson and Nordhaus, 2001). Menurut Doll and Orazem (1984), dalam proses produksi terdapat dua jenis input, yaitu input variabel dan input tetap. Input variabel adalah input yang habis dipakai dalam satu periode produksi, sedangkan input tetap adalah input yang tidak habis dipakai dalam satu periode produksi. Secara matematis fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f(X_i, Z_j) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan: Y adalah produksi (output), X_i adalah input variabel dan Z_j adalah input tetap.

Hubungan antara input dan output dalam fungsi produksi dapat dibedakan menjadi 3 macam (Nicholson, 1978) yaitu:

1. *Increasing Return* yaitu hubungan dengan kenaikan hasil yang meningkat, dimana mempunyai ciri yaitu bila terjadi peningkatan produksi senantiasa bertambah dengan ditambahkan satu-satuan faktor produksi.
2. *Constant Return* yaitu hubungan dengan kenaikan hasil yang tetap, dengan peningkatan produksi senantiasa konstan pada peningkatan satu-satuan faktor produksi.
3. *Decreasing Return* yaitu hubungan dengan kenaikan hasil yang menurun, akan terjadi peningkatan hasil yang semakin berkurang dengan ditambahkan satu-satuan faktor produksi.

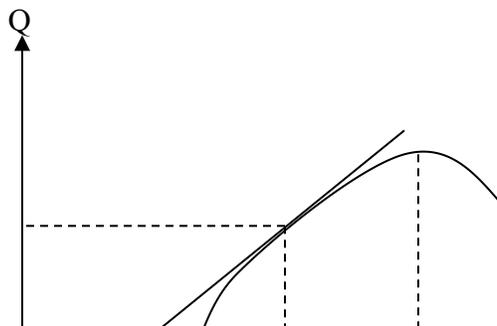
Untuk menjelaskan hubungan satu input variabel dan output adalah dengan menggunakan model fungsi produksi neoklasik. Menurut Debertin (1986) bahwa model fungsi produksi tersebut mengikuti hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of the diminishing return*). Secara grafis dapat digambarkan seperti Gambar 2.

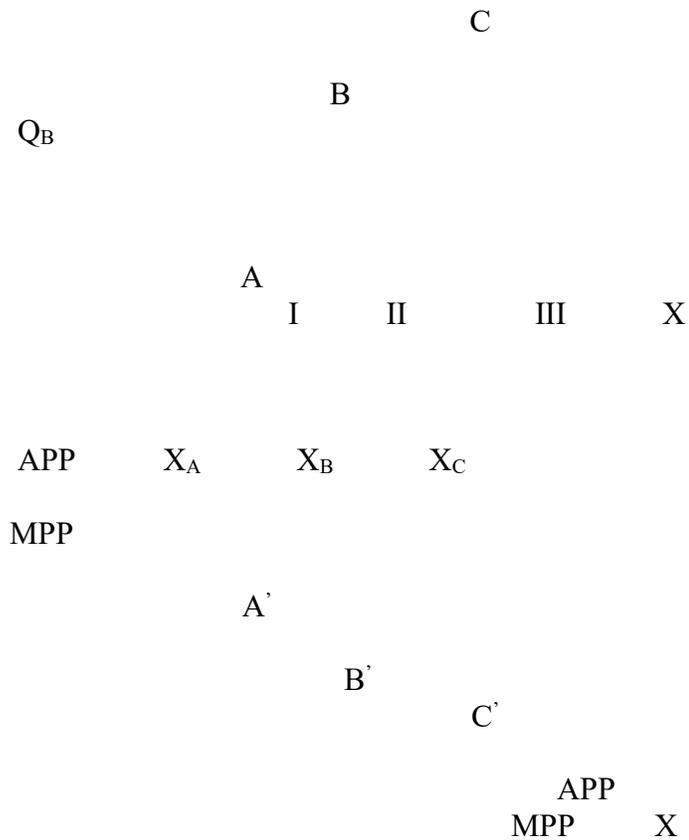
Dari Gambar 2.2, maka dapat diturunkan konsep produksi rata-rata atau *Average Physical Product* (APP) dan konsep produksi marjinal atau *Marginal Physical Product* (MPP). Fungsi produksi $Q = f(X_i)$ sering disebut sebagai *Total Physical Product* (TPP) secara matematis:

$$APP = \frac{TPP}{X} \dots\dots\dots(2)$$

$$APP \text{ maksimum bila } \frac{\partial(APP)}{\partial x} = 0 \text{ dan } \frac{\partial^2(APP)}{\partial X^2} < 0$$

$$MPP \text{ akan memotong APP pada APP maksimum: } \dots\dots\dots(3)$$





Gambar 2.2 Grafik Hubungan Input dan Output

Keterangan:

Q = Tingkat produksi

X = Input

Q_B = Tingkat produksi pada penggunaan faktor produksi

A = Titik belok (*inflection point*)

B-B' = Maksimum rata-rata produksi (APP maks.)

C = total produksi maksimum

A' = Maksimum marginal produksi (MPP maks.)

C' = Marginal produksi sama dengan nol (MPP = 0)

I & III = Daerah *irrational*

II = daerah *rational*

$$\text{Maka : } \frac{\partial(APP)}{\partial x} = \frac{f(x) - xf'(x)}{x^2} = 0$$

$$= f(x) - xf'(x) = 0$$

$$= \frac{f(x)}{x} - f'(x) = 0$$

$$= APP - MPP = 0$$

$$APP = MPP \dots\dots\dots (4)$$

MPP akan maksimum bila:

$$\frac{\partial MPP}{dx} = 0 \quad \frac{\partial^2 MPP}{\partial^2 x} < 0$$

$$\frac{\partial(MPP)}{dx} = \frac{df^1(x)}{dx} = f^1(x)$$

Elastisitas Produksi (EP) dapat dinyatakan hubungan MPP dan APP, secara matematis dirumuskan:

$$EP = \frac{\partial Q/Q}{dx/x} = \frac{dQ}{Q} \cdot \frac{x}{dx} = \frac{dQ}{dx} \cdot \frac{x}{Q}$$

$$EP = \frac{MPP}{APP} \dots\dots\dots (5)$$

Berdasarkan fungsi produksi tersebut, maka dapat dipilah menjadi 3 *stage*. Pemilahan ini juga terkait dengan konsep elastisitas produksi.

Pada Daerah I (*stage I*) disebut daerah produksi yang tidak rasional (*irrational*), karena dalam daerah ini penambahan variabel input sebesar 1% akan menyebabkan penambahan output yang selalu lebih besar dari 1%. Pada daerah ini elastisitas produksi > 1, sehingga dalam daerah ini belum tercapai pendapatan yang maskimum.

Pada daerah II, disebut sebagai daerah produksi yang rasional karena penambahan input sebesar 1% akan menyebabkan penambahan output paling tinggi sama dengan 1% dan paling rendah nol persen. Pada daerah II elastisitas produksi antara 1 dan 0, sehingga daerah ini mencapai pendapatan yang maskimum.

Pada daerah III disebut sebagai daerah tidak rasional, karena penambahan input akan menyebabkan penurunan output. Pada daerah III, elastisitas produksi < 0 , sehingga pada daerah ini pendapatan menurun.

Fungsi produksi yang sering digunakan sebagai alat analisis pada penelitian yang menggunakan pendekatan ekonometrika adalah fungsi produksi Cobb-Douglas (Yotopoulos and Nugent, 1976; Debertin, 1986; Nicholson, 1998). Secara matematis fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut:

$$Y = AX_1^{b_1} X_2^{b_2} \dots X_i^{b_i} \dots X_n^{b_n} e^u \dots\dots\dots(6)$$

Dimana :

- Y = output atau variabel yang dijelaskan
- X = input atau variabel yang menjelaskan
- A = intersep (konstan)
- b = parameter untuk masing-masing input Xi
- U = kesalahan (*disturbance term*)
- e = 2,718 (logaritma natural)

Agar pendugaan dengan fungsi produksi Cobb Douglas lebih mudah dilakukan, persamaan (13) terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk logaritma berikut :

$$\log Y = \log A + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + b_i \log X_i + \dots\dots\dots + b_n \log X_n \dots\dots\dots (7)$$

Dalam bentuk logaritma, persamaan (14) dapat diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS). Dimana nilai parameter ataupun koefisien regresi dapat dicari (Gujarati, 1997).

Salah satu ciri fungsi produksi Cobb Douglas adalah besarnya elastisitas produksi bagi setiap faktor produksi sama dengan nilai parameter faktor produksi tersebut dan menunjukkan besarnya hubungan antara setiap faktor produksi terhadap produksi (Hayami and Ruttan, 1985). Penjumlahan elastisitas (n), merupakan ukuran *return to*

scale. Apabila $n = 1$, berarti *constant return to scale*, jika $n > 1$, berarti *increasing return to scale*, dan jika $n < 1$, berarti *decreasing return to scale* (Soekartawi, 1994).

Petani dalam mengalokasikan input berusaha secara efisien agar diperoleh produksi yang maksimal. Banyaknya hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu proses produksi akan dipengaruhi oleh jumlah dan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan. Hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi produksi. Menurut Pappas (1995) fungsi produksi menggambarkan keluaran maksimal yang dapat diproduksi dengan jumlah masukan tertentu atau jumlah minimum yang diperlukan untuk memproduksi satu tingkat keluaran tertentu. Secara matematik dapat dituliskan hubungan input dan output sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan : Y adalah produksi (output), X adalah faktor produksi (input).

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan, dapat dilakukan dengan analisis fungsi produksi. Menurut Jatileksono (1993), dalam proses produksi padi (tanaman pangan) dianggap terdapat tiga input, yaitu: tanah (A), tenaga kerja (L), dan modal lancar (C). Selain itu, produksi padi juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik usahatani (E), teknologi (T), dan karakteristik sosial ekonomi keluarga petani (S). Dengan demikian dapat dirumuskan fungsi produksi tanaman pangan sebagai berikut:

$$Y = F(A, L, C, E, T, S) \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan: Y adalah output tanaman pangan.

Fungsi ini dianggap memenuhi asumsi baku untuk fungsi produksi, dan dalam satu kali proses produksi tanaman pangan dapat diasumsikan bahwa A, E, T, dan S adalah variabel-variabel eksogen.

Dalam menganalisis data hasil survai, output tanaman pangan (Y) seringkali tidak merupakan produk yang homogen dihasilkan oleh setiap petani, sehingga Y sebaiknya diukur dengan nilai produksi, yang merupakan perkalian antara kuantitas Y dengan harganya (P_y). Dalam hal ini perbedaan P_y antar petani dapat dianggap mencerminkan perbedaan kualitas output tanaman pangan yang dihasilkan (Jatileksono, 1993). Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dianalogikan untuk usahatani tanaman pangan yang menghasilkan lebih dari satu jenis, outputnya dapat diukur dengan jumlah nilai produksi dari masing-masing jenis tanaman pangan. Cara analisis tersebut telah dilakukan oleh Herdt (1971) untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di India dengan variabel dependen total nilai produksi pertanian; dan oleh Yamin (2003) untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi tanaman padi dengan variabel dependen nilai produksi padi.

Berdasarkan uraian tentang teori produksi tersebut di atas dapat diterangkan (a) bagaimana model hubungan antara faktor (*input* produksi) produksi yang digunakan oleh rumahtangga petani dan berapa produksi (*output*) yang dihasilkan, (b) berapa besar peran masing-masing input produksi dalam menentukan besarnya output produksi, (c) dapat digunakan untuk mengestimasi luas tanah minimal untuk mentas dari kemiskinan jika input produksi lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*).

2.2.2. Teori Pendapatan Usahatani dan Fungsi Keuntungan

Telah dijelaskan dari teori harga, bahwa permintaan konsumen dihadapkan oleh pendapatan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya yang didasarkan atas *utility*, sedangkan penawaran komoditas dihadapkan pula pada fungsi biaya yang dikembangkan oleh fungsi produksi untuk memperoleh keuntungan maksimum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep harga (dalam hal usahatani padi) dan pendapatan (pendapatan usahatani sawah lahan irigasi) mempunyai hubungan erat.

Penilaian suatu usahatani dipandang dari sudut ekonomi dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh (Soekartawi *et al.*, 1986). Secara umum pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi. Penerimaan dari usahatani padi sawah lahan irigasi yang dihasilkan.

Untuk menilai keragaan tersebut perlu diketahui bentuk usahatani yang dapat berupa usahatani komersial, subsistem atau semi sub-sistem. Usahatani komersial selalu berorientasi memaksimalkan keuntungan, sedangkan usahatani semi-subsistem lebih mengutamakan kepuasan atau kegunaan bagi keluarganya. Ciri lain dari usahatani semi sub-sistem adalah ukurannya kecil-kecil sehingga kegagalan usahatani merupakan kegagalan bagi keluarganya.

Didalam penelitian ini menggunakan konsep pendapatan petani. Menurut Hadisapoetro (1970) pendapatan petani dari usahatani (Farming Income=FI) terdiri dari keuntungan (π), nilai tenaga kerja dalam keluarga (I_w) dan nilai bunga modal sendiri (I_i). Atau pendapatan petani adalah pendapatan kotor dikurangi biaya alat-alat luar dan bunga modal luar, biaya alat-alat luar adalah semua korbanan yang dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan kotor kecuali nilai tenaga kerja keluarga.

Untuk menggambarkan konsep pendapatan petani, nilai jual produksi diperhitungkan dengan harga yang diterima petani (Sharma dan Sharma, 1981). Dengan demikian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah lahan irigasi dapat dianalisis dengan fungsi keuntungan.

Biaya usahatani secara umum biaya meliputi biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variabel cost*). Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang sifatnya berubah sesuai dengan besarnya produksi. Biaya tetap terdiri atas pajak lahan, penyusutan alat, tenaga kerja, dan sewa lahan, sedangkan biaya variabel terdiri dari biaya sarana produksi dan upah tenaga kerja.

Keuntungan usahatani (*profit*) dapat dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi *et al*, 1986, dan Debertin, 1986) :

$$\pi = TR - TC \dots\dots\dots (10)$$

keterangan :

- π : keuntungan
- TR : *total revenue*
- TC : *total cost*

Untuk memperoleh keuntungan yang maksimum (π) pada saat :

$$P_y \cdot MP_{xi} - P_{xi} = 0$$

$$MP_{xi} = b_i Y / X_i \dots\dots\dots (11)$$

Dimana :

- P_y : harga output per unit
- MP_{xi} : produk marjinal
- P_{xi} : harga rata-rata input X_i per unit
- b_i : Koefisien regresi input X_i
- Y : output rata-rata

X_i : rata-rata jumlah penggunaan input X_i

Sehingga diperoleh :

$$NPM_{xi} = P_{xi} \dots\dots\dots (12)$$

Dimana : NPM_{xi} = nilai produk marginal

Dengan mengasumsikan bahwa pengusaha (produsen) memaksimalkan keuntungan dari pada memaksimalkan kepuasan (utilitas) usahanya maka fungsi keuntungan diturunkan dari fungsi Cobb-Douglas dapat diturunkan dengan teknik yang dinamakan *Unit Output Price Cobb-Douglas profit Function* (UOP-CDPF). Cara ini didasarkan pada UOP-CDPF adalah suatu fungsi yang melibatkan harga produksi dan harga faktor produksi yang telah dinormalkan (Soekartawi, 1994).

Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara input dan output serta mengukur pengaruh berbagai perubahan harga input terhadap output (Soekartawi, 1994). Model fungsi keuntungan jangka pendek (Lau dan Yotopoulos, 1971) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\pi = pF(X_1, \dots, X_m; Z_1, \dots, Z_n) - \sum_{i=1}^m c_i X_i \dots\dots\dots (13)$$

keterangan :

- π : keuntungan jangka pendek
- p : harga output/unit
- c_i : harga input variabel
- X_i : input variabel
- Z_j : input tetap

Keuntungan maksimum tercapai pada saat nilai produk marjinal sama dengan harga input. Secara matematik dapat dirumuskan :

$$P \frac{\partial F(X, Z)}{\partial X_i} = c_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad \dots\dots\dots (142)$$

Menurut Lau dan Yotopoulos (1971), bahwa dengan menyatakan $c_i = c_i'/p$ sebagai harga input ke-i yang dinormalkan, maka persamaan (12) dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\frac{\partial F}{\partial X_i} = c_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad \dots\dots\dots (15)$$

Dengan menormalkan persamaan (11), maka persamaannya menjadi :

$$\pi^* = \frac{\pi}{p} = F(X_1, \dots, X_m; Z_1, \dots, Z_n) - \sum_{i=1}^m c_i X_i^* \quad \dots\dots\dots (16)$$

Dimana : π^* dikenal sebagai fungsi keuntungan UOP atau *Unit Output Price profit*.

Persamaan (14) dapat memecahkan kuantitas optimum input variabel, yang dinyatakan sebagai X_i^* , yaitu sebagai fungsi harga input variabel yang dinormalkan dan kuantitas input tetap, maka persamaannya menjadi :

$$X_i^* = f(c, Z) \quad i = 1, 2, \dots, m \quad \dots\dots\dots (17)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (17) ke persamaan (9), fungsi keuntungan menjadi :

$$\pi = pF(X_1^*, \dots, X_m^*; Z_1, \dots, Z_n) - \sum_{i=1}^m c_i X_i^* \quad \dots\dots\dots (18)$$

$$\pi = G(p, c_1, \dots, c_m; Z_1, \dots, Z_n) \quad \dots\dots\dots (19)$$

Persamaan (19) merupakan fungsi keuntungan yang memberikan nilai maksimum keuntungan jangka pendek untuk setiap set nilai (p, c', Z) . Dengan melihat fungsi persamaan (19), maka selanjutnya dapat ditulis :

$$\pi = PG^*(c_i; Z_j) \dots\dots\dots (20)$$

Jika persamaan (19) dinormalkan dengan harga output maka didapat :

$$\pi^* = \frac{\pi}{p} = G^*(c_i, \dots, c_m; Z_1, \dots, Z_n) \dots\dots\dots (21)$$

Persamaan (21) merupakan fungsi keuntungan UOP sebagai fungsi dari harga input variabel yang dinormalkan dengan harga output dan sejumlah input tetap.

Bila diasumsikan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan produksi merupakan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka fungsi keuntungan yang dinormalkan dapat ditulis sebagai berikut :

$$\pi^* = A^* \Pi(C_i^*)^{\alpha_i} \Pi(Z_j)^{\beta_j} \dots\dots\dots (22)$$

Dalam bentuk logaritma natural, persamaan (20) diatas dapat ditulis sebagai berikut :

$$\ln \pi^* = \ln A^* + \sum_{i=1}^m \alpha_i * \ln C_i^* + \sum_{j=1}^n \beta_j * \ln Z_j \dots\dots\dots (23)$$

keterangan :

- π^* : keuntungan yang dinormalkan dengan harga output
- A^* : intersep
- α_i : koefisien harga input variabel
- β_j : koefisien input tetap
- C_i^* : harga input variabel yang dinormalkan dengan harga output
- Z_j : input tetap

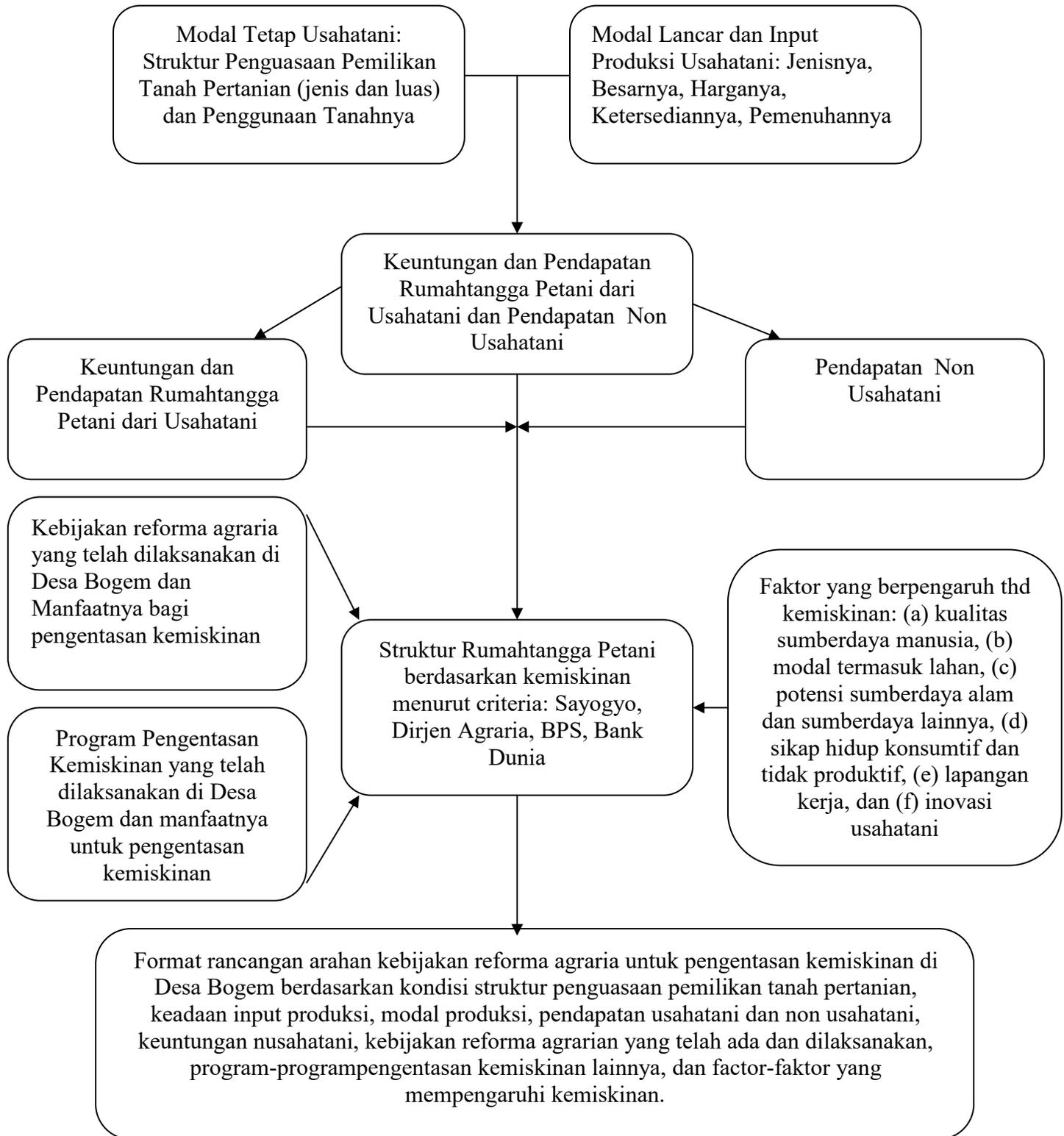
Uraian tentang teori pendapatan dan fungsi keuntungan di atas memberikan gambaran bahwa (a) pendapatan rumahtangga petani ditentukan oleh besarnya produksi dan harga pdoduk, (b) keuntungan rumahtangga petani ditentukan oleh selisih antara pendapatan rumahtaangga petani dikurangi biaya total yang merupakan hasil perkalaian

antara jumlah input produksi dan harganya, (c) dengan memperhitungkan tenaga kerja rumahtangga petani dalam proses usahatani apakah petani masih memperoleh keuntungan dari usahatani, (d) kecilnya rata-rata luas penguasaan pemilikan tanah garapan apakah rumahtangga petani dapat menghasilkan keuntungan untuk mentas dari kemiskinannya, (e) jika usahatani dari sektor pertanian dikuatirkan tidak mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan apa yang masih dapat diharapkan, dan (f) perlu dipikirkan bagaimana peran kebijakan reforma agraria untuk mengentaskan rumahtangga petani tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan teori terhadap masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditemukan variabel-variabel dan indikator-indikator penelitian serta hubungan antar variabel yang digambarkan dalam bagan alir kerangka pemikiran penelitian ini (Gambar 2).

Agar dapat lebih mudah memahami isi dan sistematika berpikir bagan alir kerangka pemikiran penelitian pada Gambar 2, dibuat narasinya sebagai berikut. Agar dapat dibuat struktur rumahtangga petani berdasarkan kemiskinan maka perlu dilakukan kategorisasi kemiskinan absolut rumahtangga petani menggunakan kriteria Sayogyo, Ditjen Agraria, BPS, dan Bank Dunia.



Gambar 2.3 Bagan alir Kerangka Pemikiran Penelitian

Hasil klasifikasi ini sekaligus untuk melihat sensitifitas dari keempat kriteria kemiskinan absolut tersebut berdasarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin senyatanya di lapangan. Variabel yang digunakan dalam penentuan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rumahtangga petani baik pendapatan total (pertanian dan non pertanian), pendapatan dari pertanian saja dan pendapatan dari non pertanian saja agar dapat diketahui porsi peran sumber pendapatan tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan rumahtangga petani. Agar dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan, maka perlu dikaji peran input produksi dalam usahatani baik modal tetap maupun modal lancar.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan selama ini umumnya telah ditempuh oleh pemerintah pada umumnya dan BPNRI pada khususnya melalui reforma agraria. Dalam rangka mencari solusi pengentasan kemiskinan, maka kedua sumber bantuan pengentasan kemiskinan tersebut perlu dikaji baik dalam hal jenis programnya maupun manfaatnya masing-masing dalam pengentasan kemiskinan. Informasi ini juga diperlukan dalam kerangka merumuskan arahan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui reforma agraria di Desa Bogem.

Faktor penyebab kemiskinan juga dikaji untuk melihat macam dan besarnya peran faktor-faktor penyebab tersebut atas terjadinya kemiskinan rumahatangga petani di suatu wilayah perdesaan. Faktor-faktor yang diduga menyebabkan kemiskinan adalah (a) kualitas sumberdaya manusia, (b) modal termasuk lahan, (c) potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, (d) sikap hidup konsumtif dan tidak produktif, (e) lapangan kerja, dan (f) inovasi usahatani.

Informasi dari hasil kajian tersebut meliputi kondisi struktur penguasaan pemilikan tanah pertanian, keadaan input produksi, modal produksi, pendapatan usahatani dan non usahatani, keuntungan usahatani, kebijakan reforma agraria yang telah ada dan dilaksanakan, program-program pengentasan kemiskinan lainnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan akan digunakan untuk merancang format arahan kebijakan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan di Desa Bogem.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori atas masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan pernyataan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. struktur rumahtangga petani menurut tingkat kemiskinannya di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten akan berbeda menurut standar penilaian yang berbeda.
2. faktor-faktor kualitas sumberdaya manusia, modal termasuk lahan, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, ketersediaan lapangan kerja, serta inovasi usahatani berpengaruh secara negatif terhadap terjadinya kemiskinan, sedangkan faktor sikap hidup konsumtif dan tidak produktif akan berpengaruh sebaliknya terhadap terjadinya kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
3. Produktivitas tanah dan komoditi tanaman yang dibudidayakan akan menentukan kombinasi antara luas minimal penguasaan pemilikan tanah dan jenis penggunaan tanah pertanian yang mampu mengentaskan kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

4. macam bantuan program kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya kepada masyarakat Desa Bogem baik secara langsung maupun melalui pemerintah Desa akan menentukan manfaatnya dalam mengurangi jumlah rumahtangga petani miskin di wilayah tersebut.
5. Potensi fisik, sosial, dan ekonomi termasuk struktur penguasaan pemilikan tanah dan usahatani di wilayah Desa Bogem serta program-program pengentasan kemiskinan yang ada dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merancang usulan kebijakan reforma agraria dalam rangka pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di tingkat desa.

2.5 Definisi Operasional

1. Determinan kemiskinan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam penelitian ini yang diduga sebagai determinan kemiskinan rumahtangga petani adalah kualitas sumberdaya manusia, modal usahatani termasuk lahan, potensi dan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, ketersediaan lapangan kerja, inovasi usahatani, dan sikap hidup konsumtif dan tidak produktif
2. Program-program pengentasan kemiskinan dan manfaatnya adalah program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Bogem dalam membantu meringankan kemiskinannya.
3. Rumahtangga petani miskin adalah rumahtangga petani yang pendapatan per kapitanya berada di bawah ambang garis kemiskinan berdasarkan kriteria kemiskinan absolut menurut Sayogyo, Ditjen Agraria, BPS, dan Bank Dunia.

4. Reforma agraria adalah kegiatan program pembaharuan agraria yang berupa kegiatan *land reform* dan *access reform*
5. Arah kebijakan reforma agraria adalah formula kegiatan yang dirancang dalam koredor kebijakan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di desa, khususnya Desa Bogem.
6. Struktur rumahtangga petani berdasarkan tingkat kemiskinannya adalah komposisi rumahtangga petani setelah dipilahkan berdasarkan tingkat kemiskinannya.
7. Struktur penguasaan pemilikan tanah pertanian adalah komposisi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian oleh rumahtangga petani di Desa Bogem yang menggambarkan komposisi dan distribusi jenis penguasaannya, terdaftar atau belumnya hak atas tanah yang dimilikinya, serta luasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Format Penelitian

Penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada kemiskinan petani, determinan, dan kebijakan pengentasannya melalui pendekatan reforma agraria ini dilaksanakan melalui survei menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan eksplanatif.

Analisis deskriptif digunakan untuk (a) menghitung dan mengklasifikasikan jumlah rumah tangga petani miskin berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Sayogjo, BPS, Dit.Jen Agraria, dan Bank Dunia, (b) mengestimasi luas penguasaan dan kepemilikan tanah minimal serta bentuk usahatani yang harus dikembangkan sehingga mampu mengentaskan petani dari kemiskinan, (c) mendeskripsikan program-program pengentasan kemiskinan yang ada dan telah dilaksanakan serta manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan, dan (d) memaparkan pemikiran akademis tentang rancangan implikasi kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dimaksud melalui pendekatan kebijakan reforma agraria.

Analisis eksplanatif dimaksudkan untuk mengetahui jenis dan besar peran dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa persamaan regresi linier berganda.

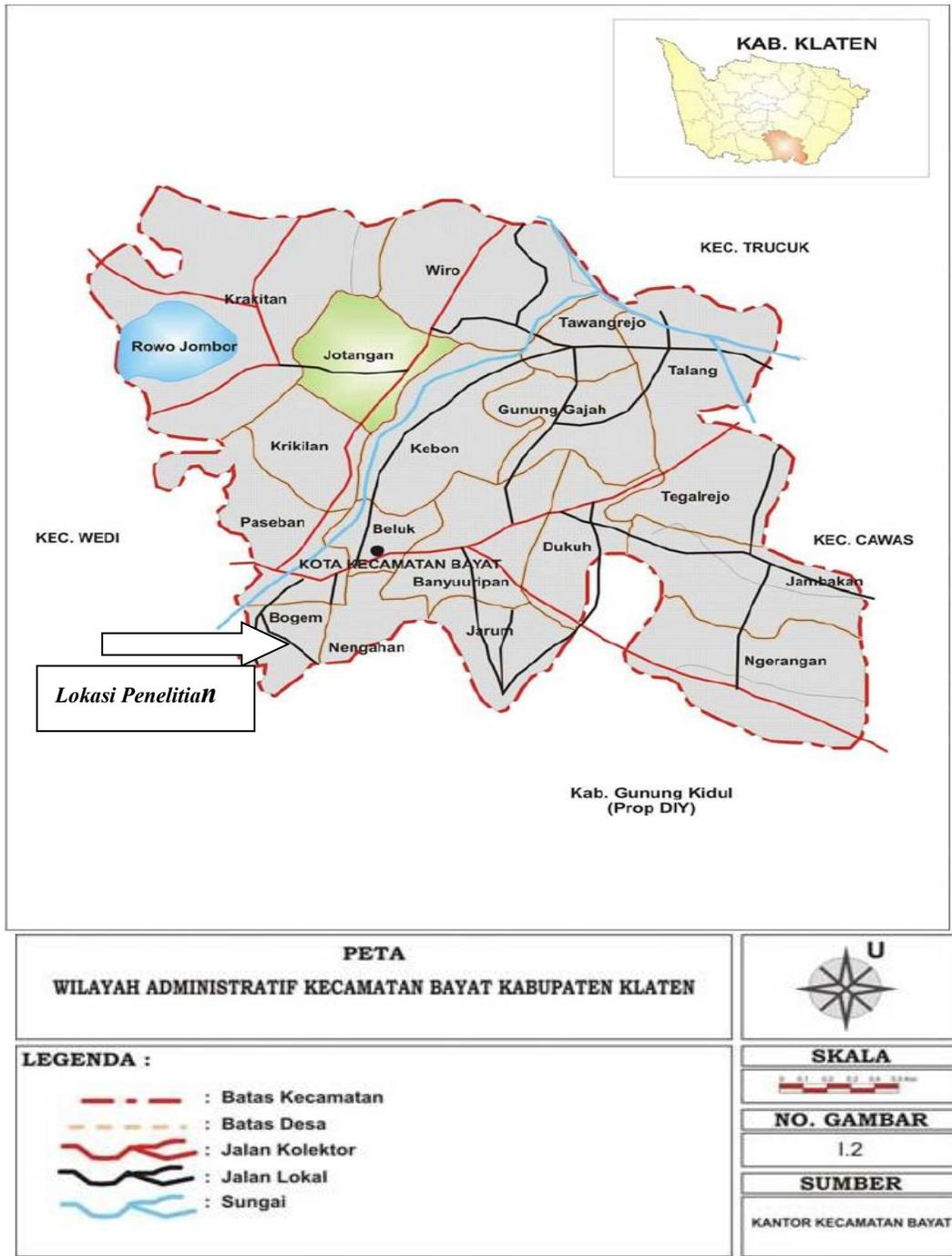
3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah satuan wilayah administrasi desa bernama Bogem, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Wilayah Desa Bogem dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa menurut laporan Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten (2004) penduduknya tergolong paling miskin ke-3 di Kecamatan Bayat setelah desa Jotangan dan Gunung Gajah di Kecamatan Bayat. Disamping itu, mata pencaharian penduduknya paling besar pada sektor pertanian. Dengan demikian di Desa Bogem ini diharapkan akan ditemukan obyek penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini mencakup struktur penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dan kemiskinan.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten

. Secara spasial lokasi penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.1.



Gambar 3.2. Lokasi Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah rumah tangga petani di desa Bogem Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Rumah tangga petani yang dimaksud dapat meliputi (a) rumah tangga petani pemilik penggarap, (b) rumah tangga petani pemilik tidak menggarap, (c) rumah tangga petani pemilik, penggarap, dan penyakap; (d) rumah tangga petani pemilik penggarap dan penggarap bagi hasil; (e) rumah tangga petani penyakap dan penggarap bagi hasil; (f) rumah tanagga petani penyakap; dan atau (g) rumah tangga petani penggarap bagi hasil.

Sampel penelitian yang akan diambil diusahakan secara *purposive* mencakup jenis rumah tangga petani dari golongan a-g tersebut, jumlah masing-masing ditentukan secara proporsional dengan kuota yang direncanakan sebanyak 96 sampel rumah tangga petani. Selanjutnya sampel dari masing-masing golongan rumah tangga petani tersebut (a-g) diambil secara random.

3.4 Jenis, Teknik Pengumpulan, Alat Pengumpulan, dan Sumber Data

Jenis data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi (a) tanah yang dikuasai dan atau dimiliki petani (tegalan, sawah, pekarangan, luasnya, penggunaannya, biaya produksi, hasil produksi, harga komoditi, pendapatan petani dari usahatani; tanahnya terdaftar/belum), diagunkan/belum); diagunkan ke mana; untuk apa uang agunan (b) pendapatan keluarga dari sektor non pertanian; (c) pengeluaran keluarga untuk pangan dan non pangan, (d) beban tanggungan ruamhtangga; (e) Jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, (f) pergiliran tanaman per tahun, (g) bantuan yang telah diterima, darimana, berapa besar, untuk apa, (h) inovasi usahatani, (i) potensi sumberdaya alam

dan ketersediaannya, (j) kebiasaan hidup dari aspek konsumsi dan produktivitasnya, (k) ketersediaan lapangan kerja, (l) kualitas SDM.

Teknik pengumpulan data meliputi (a) dokumentasi dari data sekunder di Kantor Desa, Kecamatan, BPS, dan Pemda Kabupaten Klaten dan (b) survei meliputi observasi di lapangan dan wawancara menggunakan kuesioner kepada responden rumah tangga petani dan para pejabat desa, kecamatan, dan Pemda Kabupaten Klaten.

Alat pengumpul data meliputi panduan wawancara; kuesioner, catatan survei lapang, kamera, alat perekam (*recorder*), dan alat pencatat..

Sumber data meliputi keluarga petani, Pejabat Desa, Pejabat Kecamatan, Pejabat Pemda Klaten, kantor desa, kantor kecamatan, kantor BPS, Dinas Pertanian, Kantor Pemda.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui struktur rumahtangga petani menurut tingkat kemiskinannya, maka pendapatan per kapita dalam masing-masing rumah tangga petani sampel dikategorisasikan ke dalam kriteria garis kemiskinan menurut Sayogya (1996; dimodifikasi), BPS (1993, dimodifikasi), dan Bank Dunia (1990, dimodifikasi) untuk menilai tingkat kemiskinan rumah tangga petani yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dikelompok-kelompokan menurut tingkat-tingkat kemiskinannya, persentase masing-masing kelompok dihitung disajikan ke dalam bentuk tabel-tabel dan kurva-kurva atau diagram sehingga memudahkan untuk diinterpretasikan dan dideskripsikan dengan memperhatikan tujuan penelitian.

- b. Untuk mengetahui jenis pengaruh dan besar pengaruh dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan rumahtangga petani digunakan alat analisis berupa model persamaan regresi linier berganda yang menghubungkan antara variabel independen X = faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan rumahtangga petani secara signifikan dengan $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$ atau 10% dan variabel dependen Y = tingkat kemiskinan rumahtangga petani menurut kriteria Sayogya yang dimodifikasi. Model persamaan dimaksud adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11} + \varepsilon \dots\dots\dots (24)$$

Dalam hal model ini,

Y = tingkat kemiskinan rumahtangga petani menurut Sayogyo yang dimodifikasi

X_1 = pendidikan kepala keluarga (tahun)

X_2 = Jumlah anak (Orang)

X_3 = Wesel (Rp)

X_4 = Pendapatan nonpertanian (Rp)

X_5 = Pendapatan pertanian (Rp)

X_6 = Nisbah pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total (%)

X_7 = Nisbah pengeluaran nonpangan terhadap pengeluaran total (%)

X_8 = Luas pemilikan lahan pertanian (m^2)

X_9 = Luas lahan garapan (m^2)

X_{10} = Jumlah variasi sumber pendapatan (1, 2, 3, ...)

X_{11} = Umur kepala keluarga (tahun).

B_0 = intersep

β_i (β_1 - β_6) = Koefisien regresi.

R^2 = Koefisien determinasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model ini adalah (a) model harus memenuhi asumsi klasik, (b) memiliki *Goodness of fit* yang tinggi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi dan signifikan pada taraf galat 5% dan 10%. Besarnya peran dari masing-masing faktor sebagai determinan (penentu) kemiskinan keluarga petani dinilai berdasarkan nilai koefisien regresi (β_i) yakni peran dari faktor-faktor yang diteliti akan lebih besar jika nilai (β_i) yang juga lebih tinggi.

- c. Luas minimal penguasaan dan kepemilikan lahan serta bentuk usahatani yang diperlukan untuk mengentaskan keluarga petani dari kemiskinan dihitung berdasarkan pendapatan dari usahatani tanaman padi, kacang tanah, dan jagung per hektar per tahun untuk selanjutnya diperbandingkan dengan nilai batas ambang kemiskinan untuk kriteria Sayogya atau BPS atau Bank Dunia. Dengan perhitungan sederhana dapat ditentukan berapa luas lahan pertanian minimal yang diperlukan untuk mentas dari kemiskinan per kapita
- d. Untuk mengetahui macam dan manfaat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam mengurangi jumlah rumahtangga petani miskin dilakukan dengan cara mempersandingkan hasil identifikasi macam

- program yang telah dilaksanakan dan manfaat yang dirasakan oleh masing-masing rumahtangga petani untuk mentas dari kemiskinannya.
- e. Berdasarkan kondisi luas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, bentuk usahatani, pendapatan, tingkat kemiskinan, determinasi kemiskinan, tambahan pendapatan dari usahatani yang diperlukan untuk mentas dari kemiskinan, hitungan luas minimal penguasaan tanah dan pemilikan serta bentuk usahatani yang cocok untuk mengentaskan kemiskinan terhadap keluarga petani miskin, ditambah dengan portofolio kebijakan dan pembangunan reforma agraria yang selama ini telah dihasilkan, serta kajian akademis peneliti maka akan dicoba dirancang arahan kebijakan reforma agraria dalam rangka menegentaskan kemiskinan petani yang sesuai untuk kondisi Desa Bogem, Kecamatan Bayat ini.

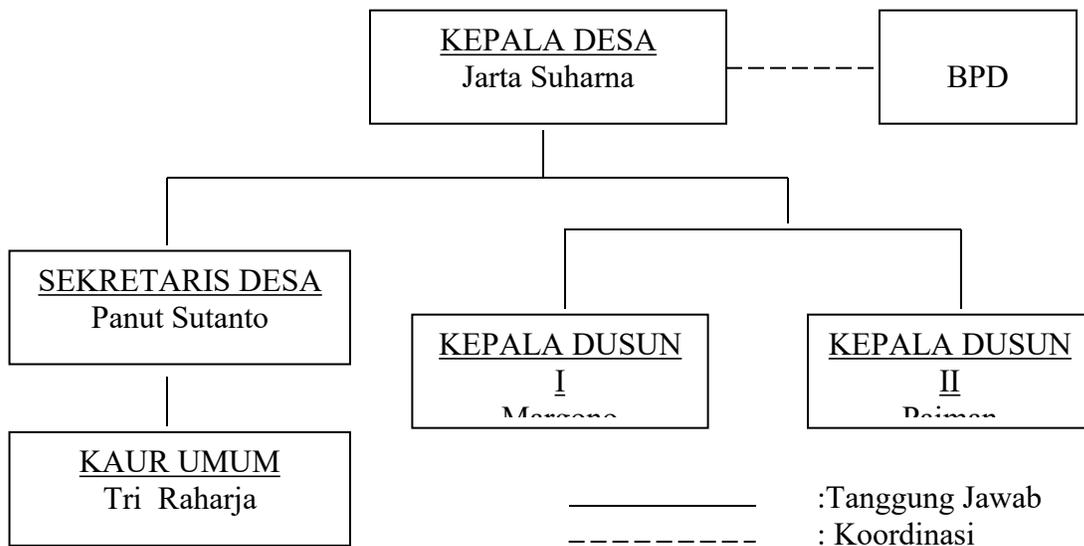
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Wilayah Administrasi dan Pemerintahan

Desa ini terletak di bagian paling selatan wilayah kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan kecamatan Gedangsari, kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Paseban, sebelah timur berbatasan dengan Desa Nengahan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaligayam. Desa Bogem memiliki luas wilayah 84,50 Ha terbagi menjadi dua dusun. Dusun I dihuni oleh 300 kepala keluarga, terdiri dari enam pedukuhan: Jambon, Cendolan, Prengguk, Mutihan, Putut

Mati, dan Bogem I. Dusun II dihuni oleh 300 kepala keluarga, terbagi menjadi dua pedukuhan: Gendol Rejo dan Bogem II.

Desa Bogem dipimpin oleh seorang kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kaur umum, dan dua kepala dusun. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara rutin terutama dalam pengelolaan pembangunan desa yang menggunakan pendanaan baik rutin, bantuan maupun swadaya masyarakat diawasi oleh BPD desa. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun bagan Gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bogem

4.2. Kependudukan

Berdasarkan data statistik Klaten dalam angka tahun 2009 – 2010 Desa Bogem berpenduduk 2.124 jiwa terdiri dari 1.058 laki-laki dan 1.096 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 0,52% per tahun. Menurut jenis kelamin dan kelompok umur penduduk DesaBogem dapat dilihat dalam table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Penduduk Menurut Desa , Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	87	79	166
2	5 – 9 Tahun	109	61	140
3	10 – 14 Tahun	109	101	210
4	15 – 19 Tahun	106	131	237
5	20 – 24 Tahun	83	90	173
6	25 – 29 Tahun	79	73	152
7	30 – 34 Tahun	75	69	144
8	35 – 39 Tahun	60	90	150
9	40 – 44 Tahun	81	70	151
10	45 -49 Tahun	43	47	90
Lanjutan Tabel 4.1				
No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	49 -54 Tahun	48	63	111
12	54 -59 Tahun	43	41	84
13	60 -64 Tahun	37	42	79
14	65 +Tahun	98	139	237
		1058	1096	2124

Sumber: Bayat In Figure 2010

Sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan pedagang selebihnya berprofesi sebagai pengrajin, buruh, dan tenaga serabutan. Penduduk yang berprofesi sebagai pedagang sebagian besar ke daerah lain, umumnya ke Jakarta. Latar belakang pendidikan masyarakat di desa ini masih dapat dikatakan rendah, mayoritas penduduknya berpendidikan sampai tingkat sekolah dasar, bahkan ada yang tidak tamat.

Karakteristik masyarakat petani dapat ditunjukkan dengan aktifitas keseharian dengan dua kelompok taninya yang masih tetap aktif sampai sekarang. Di Desa Bogem terdapat dua kelompok tani yakni Empuk Eyup dengan 45 anggota dan Bakti Makmur dengan 60 anggota. Dua kelompok tani tersebut bergabung menjadi Gapoktan Sidomakmur. Melalui Gapoktan Sidomakmur berbagai bantuan pemerintah untuk mendukung pendanaan bagi petani dan peternak Desa Bogem dapat digulirkan.

Berbagai bantuan yang telah dirasakan oleh para petani dan peternak diantaranya adalah: (1) dari pemerintah Kabupaten tahun 2007 dalam wujud indukan sapi sebesar Rp. 5.000.000,00 dan indukan kambing seharga Rp. 4.500.000,00; (2) bantuan dari CNSKR Jepang dalam wujud dana sebesar Rp. 11.150.000,00 untuk modal pupuk dan Rp. 20.000.000,00 untuk kas Gapoktan; dan tahun 2009 dari Program Agribisnis Pedesaan dapan bantuan sebesar Rp.100.000.000,00. Bantuan dalam wujud uang selanjutya dikelola oleh Gapoktan Sidomakmur berdasarkan musyawarah dan kesepakatan anggota dipergunakan untuk mendukung permodalan usaha pertanian bagi masing-masing anggota. Sampai dengan tahun 2010 dana bantuan dari Program Agribisnis telah berkembang dan mendapat keuntungan usaha sebesar Rp. 13.000.000,00 yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan.

Masyarakat Bogem menurut data termasuk wilayah ke 3 paling miskin di Kabupaten Klaten. Sebagian besar penduduknya dapat dikatakan hidup dengan taraf ekonomi pra sejahtera sesuai dengan tingkatnya seperti terlihat dalam table 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Keluarga Pra Sejahtera Menurut Desa

No	Kategori	Jumlah
1	Pra KS	505
2	KS I	84
3	KS II	56
4	KS III	34
5	KS III +	8
		687

Sumber: Bayat In Figure 2010

4.3. Kondisi Fisik

Meskipun sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani namun sebenarnya wilayah Desa Bogem secara fisik bukan merupakan daerah yang sesuai untuk pertanian sawah. Desa Bogem lebih sesuai diperuntukan untuk kehutanan, perkebunan dan peternakan. Jika digunakan untuk lahan sawah maka akan mengalami tingkat kesulitan yang tinggi mengingat faktor pembatas yang ada berupa tingkat erosi yang tinggi dan kondisi bebatuan sehingga mempengaruhi kondisi perakaran. Ketidak-sesuaian untuk lahan sawah diperparah lagi dengan karakteristik wilayah tadah hujan dengan tidak ditunjang adanya sistem irigasi baik teknis maupun non teknis. Sungai besar yang membelah desa Bogem juga memiliki karakteristik yang sama dengan sifat sawahnya yakni akan mengalami banjir besar bila terjadi hujan dan kering kerontang jika tidak hujan.

Berbagai upaya dari beberapa instansi bersama masyarakat telah diusahakan untuk mengatasi kondisi tersebut namun sampai saat ini belum berhasil. Diantara upaya yang

dilakukan adalah membuat sumur-sumur tanah di lahan sawah namun tidak ditemukan mata air tanah yang permanen. Akhirnya petani menggunakan mesin diesel untuk memompa air dari sungai, dan hal ini tentunya akan menambah beban biaya operasional sehingga akan mengurangi penghasilan dari usaha pertanian sawah. Dilihat dari luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat dalam table 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3. Luas Wilayah Menurut Desa Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah	31,60
2	Bangunan dan Halaman	34,40
3	Tegal, Kebun, Ladang	16,50
4	Tanah Lainnya	2,0
		84,50

Sumber: Kecamatan Bayat Dalam Angka, 2010.

BAB V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian dan pembahasannya meliputi: (i) Struktur rumahtangga petani menurut tingkat kemiskinannya di Desa Bogem, (ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Desa Bogem, (iii) Luas penguasaan pemilikan lahan pertanian dan jenis usahatani rumah tangga petani yang diperlukan untuk mentas dari kemiskinan di Desa Bogem, (iv) Macam dan manfaat program-program kemiskinan untuk rumahtangga petani miskin di Desa Bogem, dan (v) Implikasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan di Desa Bogem.

5.1 Struktur Rumahtangga Miskin di Desa Bogem

Struktur rumahtangga miskin merupakan kelompok-kelompok rumahtangga petani hasil klasifikasi rumahtangga berdasarkan tingkat kemiskinannya menurut kriteria Sayogyo (1976, dimodifikasi), BPS (1993, dimodifikasi), dan Bank Dunia (1990, dimodifikasi).

1. Struktur rumahtangga miskin di Desa Bogem menurut kriteria Sayogyo.

Sayogyo (1987) mengelaskan masyarakat pedesaan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiskinannya berdasarkan pendapatan maksimum per kapita yang mampu dihasilkan oleh setiap anggota masyarakat di suatu wilayah. Mengingat angka pendapatan yang digunakan oleh Sayogyo berlaku untuk tahun 1976, maka penulis memodifikasi besaran angka tersebut dengan mempertimbangkan besarnya inflasi yang telah terjadi dalam kurun waktu 1976 sampai dengan tahun 2011. Hasil modifikasi angka kriteria kemiskinan tersebut disajikan seperti pada kolom 2 Tabel 5.1.

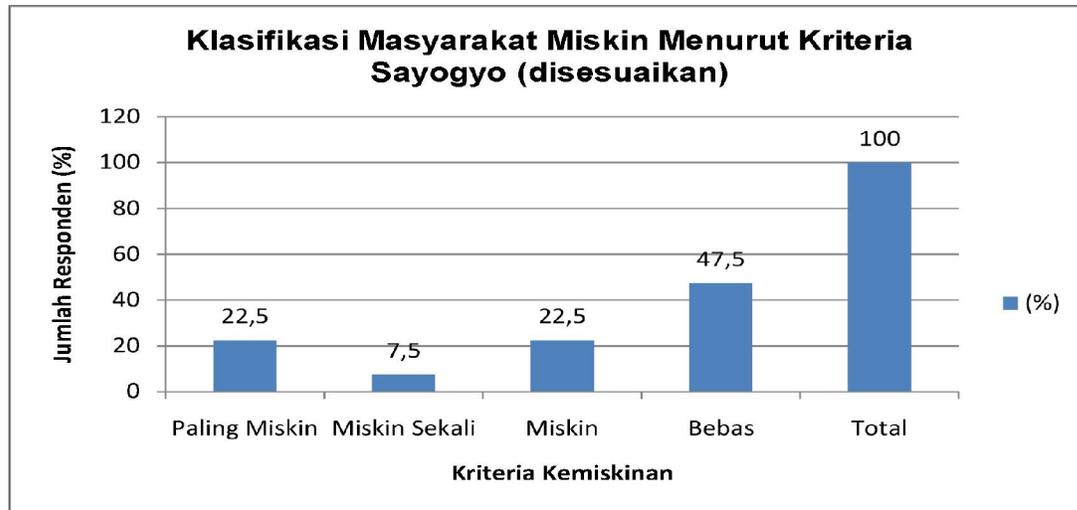
Kelompok-kelompok rumahtangga berdasarkan kemiskinan yang disajikan pada Tabel 5.1, dihasilkan setelah membandingkan antara pendapatan per kapita maksimum dengan kriteria kemiskinan kolom 1 dan 2 Tabel 5.1. Oleh karena itu, dari Tabel 5.1 dapat dikemukakan bahwa dari 40 sampel responden rumahtangga yang dianalisis diketahui bahwa sebanyak 47,5% tidak miskin sedangkan yang lainnya sebanyak 52,5% miskin. Dari sebanyak 52,5% rumahtangga miskin ini diketahui bahwa sebanyak 22,5% miskin sedangkan sisanya sebanyak 29,5% termasuk rumahtangga miskin sekali sampai miskin.

Tabel 5.1. Masyarakat miskin menurut kriteria Sayogya (1976, dimodifikasi)

Golongan	Penghasilan Maksimal Perkapita Pertahun (Rp/Tahun)	Jumlah Sampel	(%)
Paling Miskin	780,000.00	9	22.5
Miskin Sekali	1,170,000.00	3	7.5
Miskin	2,080,000.00	9	22.5
Bebas	> 2,080,000.00	19	47.5
Total		40	100

Sumber; Hasil analisis data primer tahun 2011.

Angka di atas menggambarkan bahwa sebagian lebih besar dari rumahtangga yang ada di Desa Bogem tergolong miskin sampai miskin sekali. Agar dapat dipahami secara lebih mudah data tersebut disajikan dalam wujud diagram seperti pada Gambar 5.1.



Ga

mbar 5.1. Masyarakat miskin menurut kriteria Sayogyo (dimodifikasi).

2. Struktur rumahtangga miskin di Desa Bogem menurut kriteria BPS

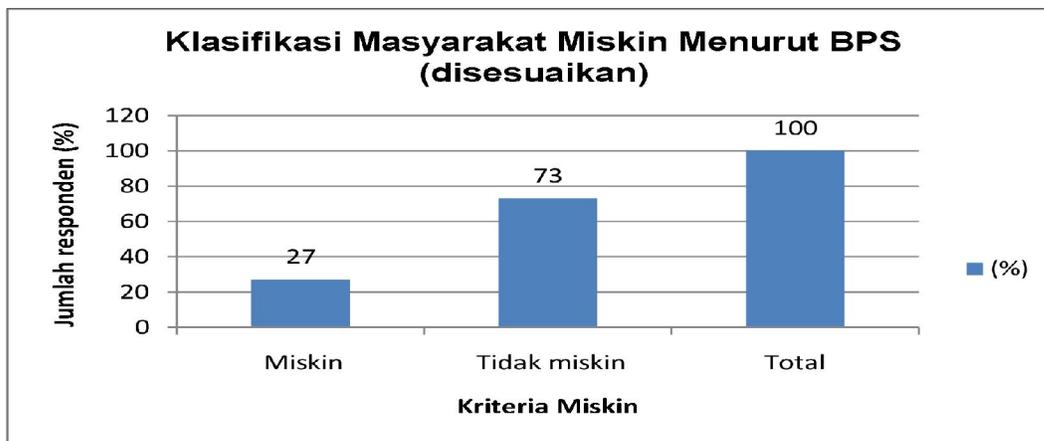
Badan Pusat Statistik (BPS) (1993) mengkelaskan masyarakat pedesaan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiskinannya berdasarkan pendapatan maksimum per kapita yang mampu dihasilkan oleh setiap anggota masyarakat di suatu wilayah. Mengingat angka pendapatan yang digunakan oleh BPS tersebut berlaku untuk tahun 1987, maka penulis memodifikasi besaran angka tersebut dengan mempertimbangkan besarnya inflasi yang telah terjadi dalam kurun waktu 1993 sampai dengan tahun 2011. Hasil modifikasi angka kriteria kemiskinan tersebut disajikan seperti pada kolom 2 Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Kelompok rumahtangga berdasarkan kemiskinannya menurut BPS (1993, dimodifikasi).

Golongan miskin	Pendapatan Setara dgn:	Jumlah	(%)
Miskin	< 2100 k.kal	11	27
Bebas dari Kemiskinan	≥ 2100 k.kal	29	73
Total		40	100

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2011.

Kelompok-kelompok rumahtangga berdasarkan kemiskinan yang disajikan pada Tabel 5.2, dihasilkan setelah memperbandingkan antara pendapatan per kapita maksimum dengan kriteria kemiskinan kolom 1 dan 2 Tabel 5.2. Oleh karena itu, dari Tabel 5.2 dapat dikemukakan bahwa dari 40 sampel responden rumahtangga yang dianalisis diketahui bahwa sebanyak 27 % miskin sedangkan yang lainnya sebanyak 73 % tidak miskin. Hasil ini menggambarkan fenomena yang berkebalikan dengan klasifikasi kemiskinan menurut criteria Sayogyo (1976). Gambar 5.2 dimaksudkan untuk memperjelas kondisi kemiskinan di Desa Bogem menurut kriteria BPS.



Gambar 5.2 Masyarakat miskin menurut kriteria BPS (1993, dimodifikasi) di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

3. Struktur rumahtangga miskin di Desa Bogem menurut kriteria Bank Dunia.

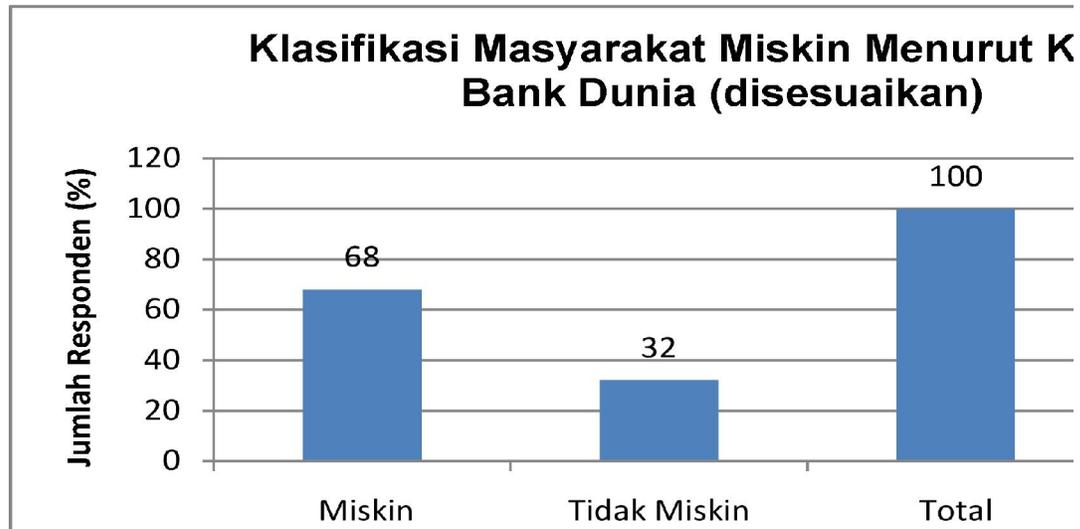
Bank Dunia (1990) mengelaskan masyarakat pedesaan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiskinannya berdasarkan pendapatan maksimum per kapita yang mampu dihasilkan oleh setiap anggota masyarakat di suatu wilayah. Mengingat angka pendapatan yang digunakan oleh Bank Dunia tersebut berlaku untuk tahun 1990, maka penulis memodifikasi besaran angka tersebut dengan mempertimbangkan besarnya nilai tukar rupiah yang telah terjadi pada tahun 2011. Hasil modifikasi angka kriteria kemiskinan tersebut disajikan seperti pada kolom 2 Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Masyarakat miskin menurut kriteria Bank Dunia di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Kriteria Miskin	Pendapatan per Kapita	Jumlah	(%)
Miskin	< 2.475.000	27	68
Bebas dari Kemiskinan	\geq 2.475.000	13	32
Total		40	100

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2011.

Kelompok-kelompok rumahtangga berdasarkan kemiskinan yang disajikan pada Tabel 5.3, dihasilkan setelah memperbandingkan antara pendapatan per kapita maksimum dengan kriteria kemiskinan kolom 1 dan 2 Tabel 5.3. Oleh karena itu, dari Tabel 5.3 dapat dikemukakan bahwa dari 40 sampel responden rumahtangga yang dianalisis diketahui bahwa sebanyak 32 % tidak miskin sedangkan yang lainnya sebanyak 68 % miskin. Hasil ini menggambarkan fenomena yang berkebalikan dengan klasifikasi kemiskinan menurut kriteria Sayogyo (1976) dan senada dan hamper sama dengan kriteria kemiskinan menurut BPS. Gambar 5.3 dimaksudkan untuk memperjelas kondisi kemiskinan di Desa Bogem menurut kriteria Bank Dunia.



Gambar 5.3. Masyarakat miskin menurut kriteria BPS (dimodifikasi) di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumahtangga Petani

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem digunakan model persamaan linier berganda dengan variabel independen, variabel dependen, dan model persamaan regresi linier berganda seperti ditunjukkan pada persamaan 2.4. Dengan model tersebut diperoleh nilai-nilai statistik uji regresi seperti disajikan pada Tabel 5.4.

Disamping besaran-besaran statistik seperti pada Tabel 5.4, perlu dikemukakan besaran-besaran lain untuk menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk tujuan ini sesuai. Pertama dengan menggunakan SPSS 17 dihasilkan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai yang < 10 , sehingga tidak terdapat multikoleniaritas antar variabel indpenenden. Nilai F-test Prob. Sebesar 0,000133 (mendekati nol) yang lebih kecil dari $\alpha = 1\%$ berarti bahwa secara bersama-sama variasi nilai yang ada pada variabel-variabel independen berpengaruh signifikan dengan derajat kepercayaan 99% terhadap variasi yang ada pada nilai-nilai variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,603 artinya bahwa variasi nilai yang terjadi pada nilai variabel dependen sebesar 60,3% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada nilai-nilai variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan kedua besaran statistik uji regresi tersebut yaitu F-test Prob. dan R^2 dapat disimpulkan bahwa *Goodness of Fit* model yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem adalah baik. Selanjutnya uji heteroskedastisitas varian model juga telah diuji dan tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada model. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier yang digunakan merupakan model yang BLUE (*Best Linear Unbiase Equation*) yang siap digunakan sebagai instrumen estimator.

Untuk melihat variabel-variabel independen mana yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen tingkat kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem digunakan uji-t yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5.4. Berdasarkan hasil uji-t tersebut diketahui pengaruh dari masing-masing faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan rumahtangga di Desa Bogem sebagai berikut:

Tabel 5.4. Statistik regresi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kesejahteraan (nirkemiskinan) rumahtangga petani di Desa Bogem.

Variabel	Koefisien	t-test Prob	Signifikasi
Pendidikan kepala keluarga	27827,9	0,46	ts
Jumlah anak	-0.51046	0.0091	***
Wesel	0.000754	0.9108	ts
Pendapatan nonpetanian	0.0991505	0	***

Pendapatan Petanian	0.00847	0.7645	ts
Nisbah pengeluaran pangan thd pengeluaran total	-0.17275	0.0721	*
Nisbah Pengeluaran nonpangan thd pengeluaran Total	0.00509	0.8991	ts
Luas pemilikan lahan petanian	0.0111514	0.3479	ts
Luas lahan garapan	0.00369	0.794	ts
Jml variasi sumber pendapatan	73537	0,659	ts
Umur	-24787,3	0,729	ts
Intersep	15.24178		
VIF		< 10	
F-test Prob		0.000133	
R ²		0.603	
R ² Adj		0.501	

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2011.

1. Pendidikan kepala keluarga

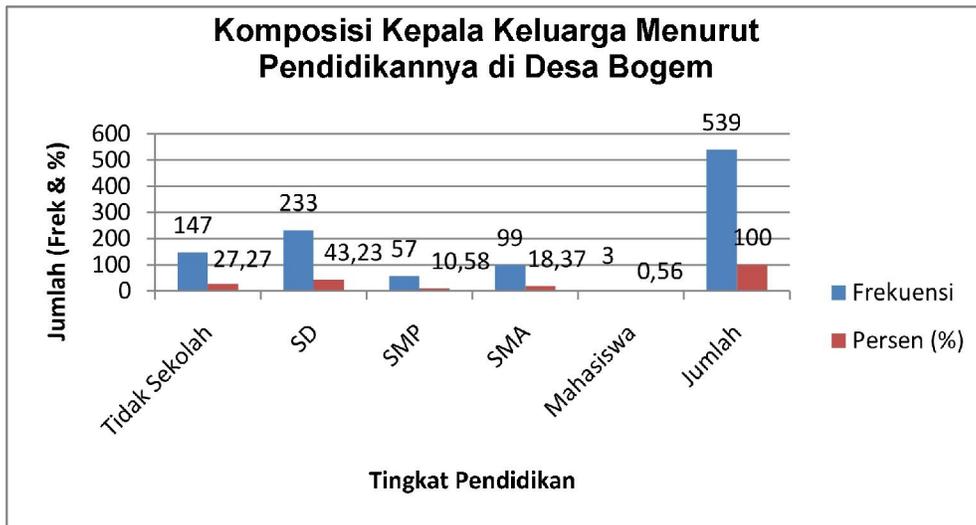
Pendidikan kepala keluarga digunakan untuk menunjukkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang paling menentukan di dalam suatu rumahtangga petani apakah keluarganya menjadi keluarga miskin atau sejahtera.

Nilai koefisien regresi (β_1) yang positif tidak signifikan berarti bahwa peningkatan pendidikan para kepala keluarga di Desa Bogem tidak signifikan mempengaruhi kondisi kemiskinan rumahtangganya. Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan data kondisi pendidikan kepala keluarga rumahtangga petani di Desa Bogem seperti pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.5.

Tabel 5.5. Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Kelompok pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
Tidak Sekolah	147	27.27
SD	233	43.23
SMP	57	10.58
SMA	99	18.37
Mahasiswa	3	0.56
Jumlah	539	100

Sumber: Analisis data sekunder tahun 2011.



Gambar 5.5. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Dari Tabel 5.5 dan Gambar 5.5 diketahui bahwa tingkat pendidikan paling dominan para kepala keluarga di Desa Bogem adalah SD dan tidak sekolah, kemudian disusul oleh SMA dan SMP, serta perguruan tinggi yang sangat terbatas jumlahnya. Komposisi pendidikan kepala keluarga rumahtangga petani di Desa Bogem yang demikian mampu menjelaskan mengapa pendidikan KK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem. Informasi ini erat kaitannya dengan gambaran rendahnya kreativitas dan kemampuan KK di Desa Bogem sebagai SDM andalan yang bertanggungjawab atas pengentasan keluarganya.

2. Jumlah anak

Koefisien regresi (β_2) jumlah anak yang negatif dan signifikan berarti bahwa semakin besar jumlah anak di suatu rumahtangga petani secara signifikan

menghambat terwujudnya kesejahteraan keluarga mereka dan mendorong terjadinya kemiskinan. Hal ini terjadi pada waktu anak-anak dari suatu rumahtangga masih belum produktif dan masih menjadi beban keluarga. Jika kondisinya demikian, maka hal tersebut dapat dipahami mengingat penambahan jumlah anak berarti pula penambahan beban tanggungan keluarga yang berarti pula penambahan jumlah pengeluaran dan peningkatan tuntutan penyediaan pendapatan keluarga.

Jika yang produktif dalam suatu keluarga hanya kepala keluarganya (ayahnya), maka seorang ayah ini harus menanggung tugas untuk menyediakan pendapatan yang lebih besar bagi seluruh anggota keluarganya agar mentas dari kriteria kemiskinan. Hal sebaliknya terjadi, jika anak-anaknya telah bekerja dan produktif, maka mereka dapat menyumbang pendapatan bagi keluarga tersebut sehingga keluarga yang demikian umumnya dapat mentas dari kemiskinan.

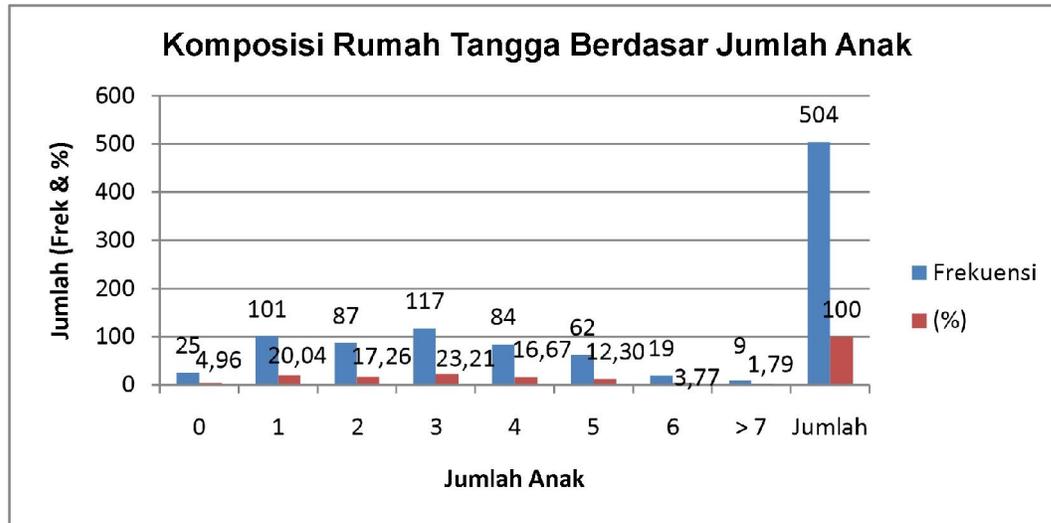
Untuk membantu menerangkan pengaruh jumlah anak terhadap kemiskinan dapat disimak Tabel 5.6 dan Gambar 5.6. dari tabel dan gambar tersebut diketahui bahwa di Desa Bogem struktur rumahtangga petani dengan anak sebanyak 3 orang paling dominan, disusul oleh keluarga petani dengan anak sebanyak 1 dan kemudian keluarga petani dengan anak sebanyak 2 dan 4 orang. Jika dijumlahkan maka keluarga petani dengan anak sebanyak 3-5 orang mendudki posisi 52,18%. Angka jumlah anak ini menggambarkan beban yang berat bagi rumahtangga petani dengan pendapatan yang terbatas untuk penghidupannya.

Tabel 5.6 Komposisi Rumahtangga berdasarkan jumlah anak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Jumlah Anak (Orang)	Frekuensi	(%)
0	25	4.96
1	101	20.04

2	87	17.26
3	117	23.21
4	84	16.67
5	62	12.30
6	19	3.77
> 7	9	1.79
Jumlah	504	100

Sumber: Hasil analisis data primer 2011.



Gambar 5.6. Komposisi Rumahtangga berdasarkan jumlah anak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Berdasarkan kondisi jumlah anak tersebut maka dapat dipahami jika jumlah anak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kemiskinan keluarga petani di Desa Bogem.

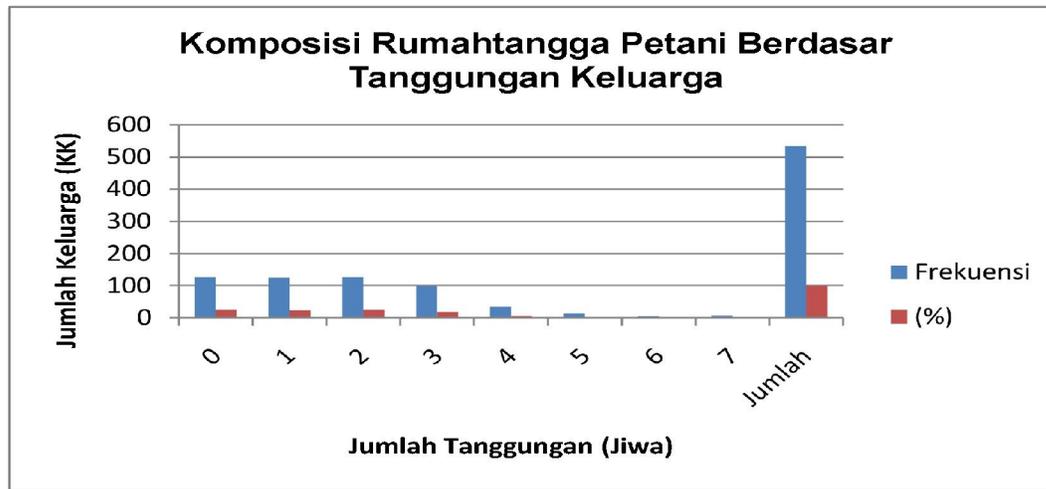
Lebih lanjut jumlah anak ini ada kaitannya dengan beban tanggungan rumahtangga. Besarnya beban tanggungan rumahtangga disajikan pada Tabel 5.7 dan Gambar 5.7.

Tabel 5.7. Komposisi Rumahtangga berdasarkan Tanggungan Keluarga di Desa Bogem Kecamatan Bayat.

Jumlah Tanggungan Keluarga (Jiwa)	Frekuensi	(%)
0	126	23.55
1	124	23.18
2	126	23.55
3	99	18.50

4	35	6.54
5	13	2.43
6	5	0.93
7	7	1.31
Jumlah	535	100

Sumber: Hasil analisis data sekunder 2011



Gambar. 5.7. Komposisi Rumahtangga berdasarkan Tanggungan Keluarga di Desa Bogem Kecamatan Bayat.

Dari Tabel 5.7 dan Gambar 5.7 tersebut juga diketahui bahwa rumahtangga petani dengan beban tanggungan rumahtangga sebesar 1-4 orang menduduki porsi sebesar 64,83%. Data ini mendukung temuan di atas bahwa besarnya jumlah anak terutama yang emnjadi tanggungan berpengaruh terhadap terjadinya kemiskinan rumahtangga.

Sebagai akibat dari terjadinya kemiskinan rumahtangga petani tersebut adalah terjadinya penurunan jumlah anak yang dilahirkan lebih belakang untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi seperti ditunjukkan pada Tabel 5.8 dan Gambar 5.8.

Tabel 5.8. Komposisi tingkat pendidikan anak berdasarkan urutan nomor anak dari masyarakat di Desa Bogem Kecamatan Bayat.

Pendidikan Anak	Anak ke-1		Anak ke-2		Anak ke-3		Anak ke-4		Anak ke-5	
	Frek.	(%)								
Tidak Sekolah	25	5.30	21	5.53	11	3.97	5	2.98	3	3.41
SD	202	42.80	158	41.58	103	37.18	55	32.74	25	28.41

SMP	89	18.86	66	17.37	60	21.66	36	21.43	16	18.18
SMA	144	30.51	123	32.37	99	35.74	71	42.26	41	46.59
Perguruan Tinggi	12	2.54	12	3.16	4	1.44	1	0.60	3	3.41
Jumlah	472	100	380	100	277	100	168	100	88	100

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2011.

Informasi tersebut juga mendukung bahwa jumlah anak terutama yang masih menjadi beban tanggungan keluarga sangat mempengaruhi terjadinya kemiskinan di rumahtangga tersebut yang ditandai oleh penurunan kemampuan keluarga untuk menyekolahkan anak-anak yang lahir belakangan ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 5.8. Komposisi tingkat pendidikan anak berdasarkan urutan nomor anak dari masyarakat di Desa Bogem Kecamatan Bayat (orang).

3. Wesel

Wesel merupakan salah satu bentuk transfer uang dari orang lain ke suatu rumahtangga. Transfer uang ini biasanya berasal dari anak yang sudah bekerja di kota atau daerah lain kepada orang tuanya. Nilai koefisien regresi (β_3) yang positif tetapi tidak signifikan berarti bahwa walaupun keberadaan wesel dapat meningkatkan kesejahteraan atau mentas dari kemiskinan namun distribusi rumahtangga petani yang memperoleh wesel ini belum merata dan besarnya juga belum memadai untuk mentas dari kemiskinan.

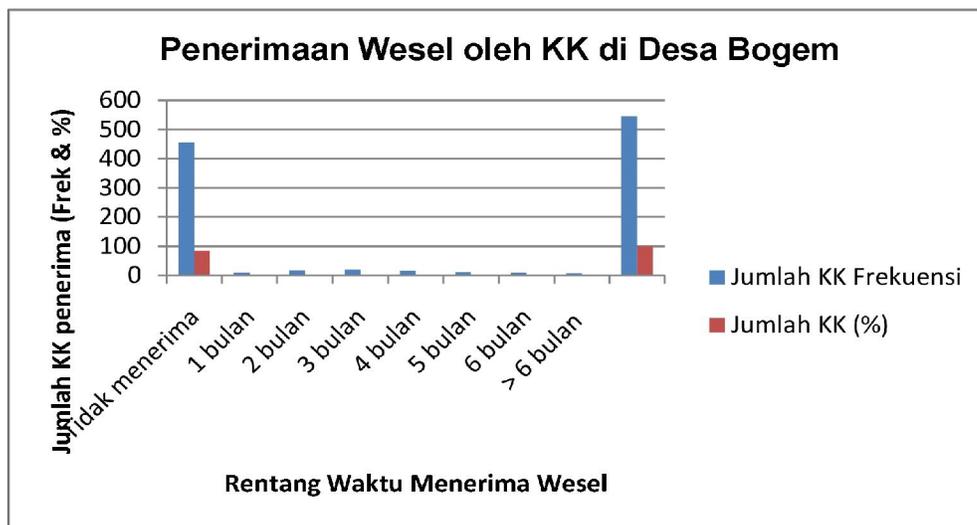
Rendahnya wesel ini juga terkait dengan rata-rata pendidikan para anak-anak rumahtangga petani yang menjadi perantau yang kurang tinggi sehingga mungkin belum mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang memadai.

Tabel 5.9 dan Gambar 5.9 berikut menunjukkan kondisi warga Desa Bogem yang menerima wesel dari anak dan cucunya di rantau relatif rutin per satu sampai dua bulan sekali.

Tabel 5.9 Frekuensi Warga Desa Bogem menerima wesel

Frekuensi menerima Wesel per	Jumlah KK	
	Frekuensi	(%)
Tidak menerima	456	83.67
1 bulan	10	1.83
2 bulan	17	3.12
3 bulan	20	3.67
4 bulan	15	2.75
5 bulan	11	2.02
6 bulan	9	1.65
> 6 bulan	7	1.28
	545	100

Sumber: Hasil analisis data primer 2011.



Gambar 5.9 Frekuensi Warga Desa Bogem menerima wesel

Dari Tabel 5.9 dan Gambar 5.9 tersebut diketahui bahwa jumlah KK yang menerima wesel dari anak dan cucunya tergolong sedikit yaitu hanya 16,33%. Oleh karena itu dapat dipahami jika wesel yang diterima oleh sebagian kecil KK di Desa Bogem belum mempengaruhi secara signifikan upaya pengentasan kemiskinan di desa ini.

4. Pendapatan nonpertanian

Pendapatan nonpertanian adalah pendapatan rumahtangga petani dari luar usahatani. Nilai koefisien regresi (β_4) yang positif dan signifikan berarti bahwa peningkatan nilai variabel pendapatan nonpertanian berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rumahtangga petani di Desa Bogem. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Bogem yang bebas dari kriteria keluarga miskin adalah keluarga-keluarga yang mengandalkan usaha nonpertanian untuk meningkatkan pendapatannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

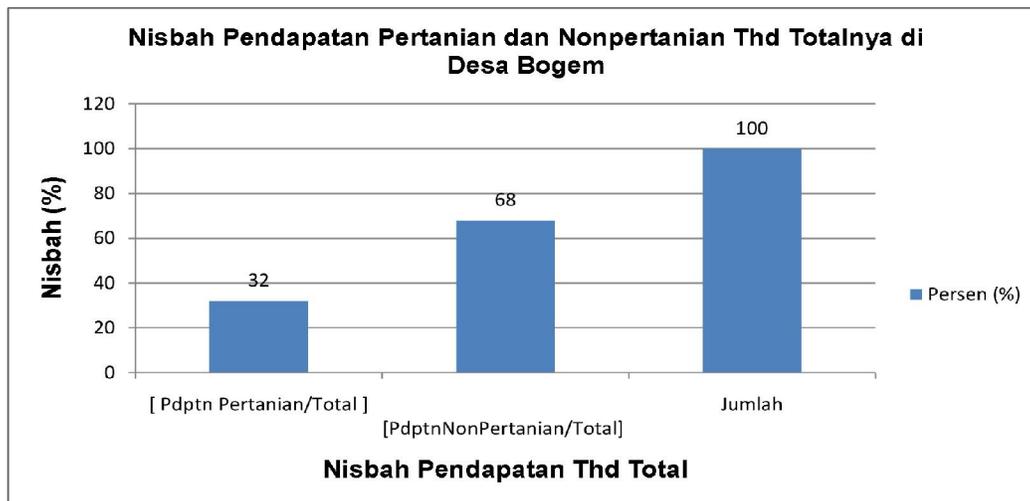
Tabel 5.10. Proporsi pendapatan rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pendapatan totalnya di Desa Bogem

Atribut pendapatan dan pengeluaran sampel responden	Persen (%)
Proporsi Pendapatan Nonertanian dari Total Pendapatan	68
Proporsi Pendapatan Pertanian dari Total Pendapatan	32
Jumlah	100

Sumber: Sumber: Hasil analisis data primer 2011.

Berdasarkan Tabel 5.10 dan Gambar 5.10 diketahui bahwa pendapatan rumahtangga petani dari luar uahatani (nonpertanian) jauh lebih dominan dari pendapatan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan para keluarga petani diperoleh informasi bahwa sumber pendapatan dari nonpertanian ini berasal dari wesel anak-anaknya, pendapatan dari berjualan bubur kacang ijo, berjualan dawet,

berjualan nasi kucing, berdagang candak kulak, kerajinan dari bambu berupa anyaman tampah, kalo, tambir, dan kipas serta kerajinan dari batok kelapa berupa irus, dan dari kayu berupa enthong. Mereka menggunakan modal dari pinjaman modal BRI melalui agunan sertipikat tanahnya.



Gambar 5.10. Proporsi pendapatan rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pendapatan totalnya di Desa Bogem

Proporsi pendapatan rumahtangga petani di Desa Bogem dari nonpertanian yang mencapai 68% dari pendapatan totalnya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Desa Bogem akan lebih berhasil jika ditempuh dari jalur nonpertanian terutama dari pengembangan *entrepreneurship* masyarakatnya. Sebaliknya, pendapatan rumahtangga petani di Desa Bogem dari pertanian yang hanya 32% menunjukkan bahwa pembangunan bidang pertanian untuk mengatasi kemiskinan di desa ini perlu dikaji kembali. Akhirnya dapat dipahami jika pendapatan rumahtangga petani dari nonpertanian ini berpengaruh signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di desa Bogem.

5. Pendapatan pertanian

Pendapatan pertanian adalah pendapatan yang diperoleh oleh rumahtangga yang berasal dari kegiatan usahatani. Nilai koefisien regresi (β_4) yang positif tidak signifikan berarti bahwa pendapatan dari pertanian tidak berpengaruh secara nyata terhadap rumahtangga untuk mentas dari kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 5.10 dan Gambar 5.10 diketahui bahwa pendapatan rumahtangga petani dari pertanian jauh lebih kecil dari pendapatan nonpertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan para keluarga petani diperoleh informasi bahwa pendapatan dari pertanian yang rendah disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan pertanian yang mereka garap karena berupa lahan tegalan yang tidak mendapatkan pasokan air pengairan. Disamping itu, luas lahan garapan yang sempit juga menyebabkan usahatani mereka tidak efisien artinya input produksi yang dibutuhkan untuk setiap hektar lahan pertanian menjadi sangat tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan selisih antara penerimaan (*revenue*) dari produksi pertanian dengan biaya input produksinya menjadi sangat kecil.

Proporsi pendapatan rumahtangga petani di Desa Bogem dari pertanian yang hanya 32% dari pendapatan totalnya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Desa Bogem akan berat jika jika ditempuh dari jalur pertanian. pertanian untuk mengatasi kemiskinan di desa ini perlu dikaji kembali. Akhirnya dapat dipahami jika pendapatan rumahtangga petani dari pertanian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di desa Bogem.

6. Nisbah pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total

Nisbah pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total menggambarkan besarnya proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan terhadap pendapatan totalnya. Oleh karena itu, semakin besar nilai nisbah ini berarti semakin rendah status sosial-ekonomi rumahtangga tersebut, karena keluarga yang demikian masih hanya memikirkan urusan pangan daripada pengeluaran nonpangan yang dapat berupa *saving* dan investasi lainnya seperti biaya sekolah anak-anak, membeli lahan pertanian, membeli kendaraan bermotor, membeli peralatan pertanian atau peralatan lainnya. Semakin tinggi nisbah tersebut semakin dekat keluarga tersebut dari kriteria miskin.

Nilai koefisien regresi (β_5) yang negatif dan signifikan berarti bahwa peningkatan nilai nisbah pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total suatu rumahtangga diikuti secara signifikan oleh penurunan tingkat kesejahteraan keluarga petani tersebut. Dengan pernyataan lain, profil rumahtangga petani di Desa Bogem menunjukkan kriteria mendekati ke kriteria miskin yang ditandai oleh nilai nisbah pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total yang besar.

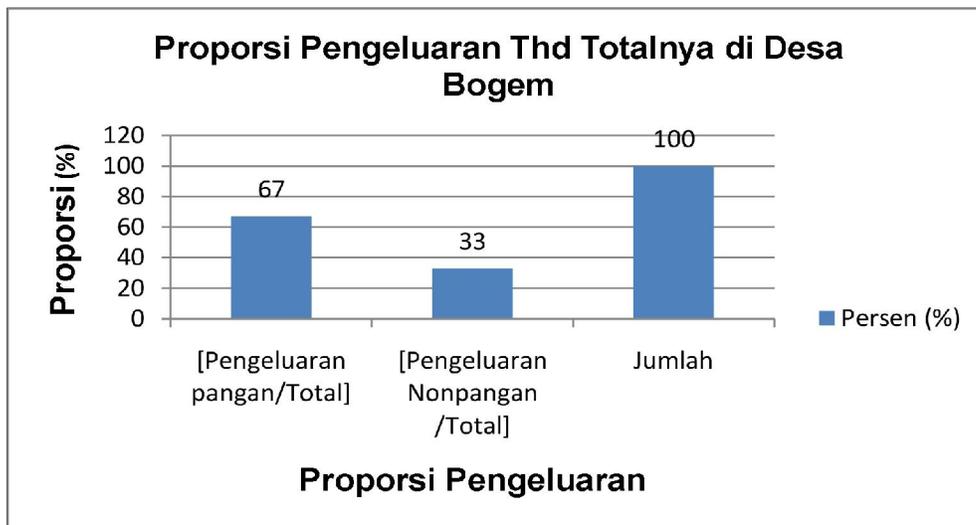
Untuk membantu menjelaskan fenomena pengaruh dari nisbah pengeluaran pangan dengan pengeluaran total terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bogem dapat diperhatikan Tabel 5.11 dan Gambar 5.11.

Tabel 5.11. Proporsi pengeluaran rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pengeluaran totalnya di Desa Bogem

Atribut pendapatan dan pengeluaran sampel responden	Persen (%)
Proporsi Pengeluaran pangan dari Total Pengeluaran	67
Proporsi Pengeluaran Nonpangan dari Total Pengeluaran	33
Jumlah	100

Sumber: Hasil analisis data primer 2011.

Dari tabel dan gambar tersebut diketahui bahwa proporsi pengeluaran rumahtangga petani untuk pangan dengan pengeluaran totalnya adalah 67% yang berarti bahwa rumahtangga petani memperoleh pendapatan yang besarnya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan sedangkan porsi untuk memenuhi kebutuhan nonpangannya masih sangat rendah (33%). Hal ini menggambarkan suasana sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah.



Gambar 5.11 Proporsi pengeluaran rumahtangga petani dari pertanian dan nonpertanian terhadap pengeluaran totalnya di Desa Bogem

7. Nisbah pengeluaran nonpangan terhadap pengeluaran total

Nisbah pengeluaran nonpangan terhadap pengeluaran total digunakan untuk melihat proporsi pengeluaran nonpertanian rumahtangga petani terhadap pengeluaran totalnya. Jika nilai nisbah ini tinggi berarti bahwa petani hanya mengalokasikan sebagian lebih besar pendapatannya untuk kepentingan nonpangan seperti *saving* dan investasi daripada pengeluaran untuk pangan.

Nilai koefisien regresi (β_6) yang positif dan tidak signifikan berarti bahwa peningkatan nilai nisbah pengeluaran nonpertanian terhadap pengeluaran total di Desa Bogem tidak berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan atau mentas dari kemiskinan. Hal ini dapat dipahami, karena pendapatan rumahtangga petani yang umumnya rendah hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan nonpetaniannya masih sangat minimal.

8. Luas pemilikan lahan pertanian

Nilai koefisien regresi (β_7) yang positif tetapi tidak signifikan berarti bahwa peningkatan luas pemilikan lahan oleh petani di Desa Bogem tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar masyarakat di Desa Bogem tidak memiliki lahan pertanian, lahan pertaniannya adalah lahan kering yang memiliki produktivitas yang rendah oleh karena itu pendapatan yang dihasilkan dari pemilikan lahan pertanian ini tidak dapat secara signifikan mempengaruhi kesejahteraannya atau mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Untuk membantu menjelaskan pengaruh dari luas pemilikan lahan pertanian terhadap pengentasan kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem digunakan informasi tentang luas pemilikan lahan pekarangan (Tabel 5.12 dan Gambar 5.12) dan lahan tegalan (Tabel 5.13 dan Gambar 5.13).

Tabel 5.12 Keragaman Kepemilikan Lahan Pekarangan di Desa Bogem Kecamatan Bayat

Keragaman Kepemilikan Pekarangan (m ²)	Jumlah	(%)
Tidak Punya Lahan	35	11.63
1 s/d 500	59	19.60
501 s/d 1000	104	34.55

1001s/d 1500	46	15.28
1501s/d 2000	26	8.64
2001 s/d 2500	12	3.99
2501s/d 3000	5	1.66
3001s/d 3500	6	1.99
3001s/d 4000	4	1.33
4001s/d 4500	3	1.00
>4500	1	0.33
Total	301	

Sumber: Data primer 2011



Gambar 5.12. Keragaan Kepemilikan Lahan Pekarangan di Desa Bogem Kecamatan Bayat

Dari Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa luas pemilikan lahan pekarangan oleh masyarakat di Desa Bogem paling dominan adalah luasan 501 -1000 m² disusul oleh luas pemilikan 1 – 500 m² dan luas pemilikan 1000-1500 m² serta anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan pekarangan (*landless*). Lahan pekarangan ini tampak tidak dimanfaatkan secara efektif dengan jenis tanaman produktif melainkan hanya ditanami dengan tanaman-tanaman tahunan yang tidak produktif berupa pohon kayu-kayuan yang tidak bernilai ekonomi tinggi, walaupun beberapa ada yang ditanami dengan tanaman jati dan mahoni. Oleh karena itu, produktivitas lahan pekarangan di

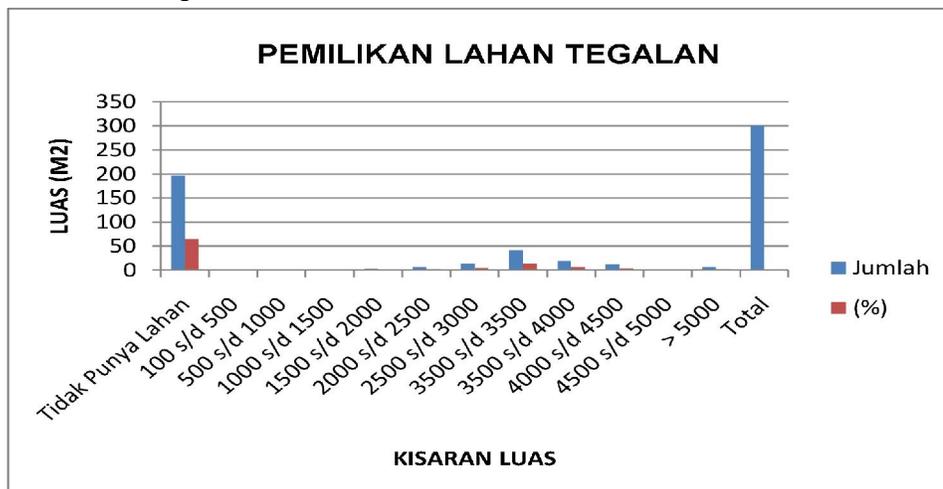
Desa Bogem ini tergolong rendah sehingga tidak mampu mendongkrak pendapatan keluarga petani untuk mentas dari kemiskinannya.

Masyarakat *landless* juga mewarnai kondisi kepemilikan lahan pekarangan di Desa Bogem.

Tabe 5.13 Keragaan Kepemiilikan Lahan Pertanian tegalan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat

Keragaman Kepemilikan Lahan Pertanian Tegalan	Jumlah	(%)
Tidak Punya Lahan	197	65.45
1 s/d 500	1	0.33
501 s/d 1000	0	0.00
1001s/d 1500	1	0.33
1501s/d 2000	2	0.66
2001s/d 2500	6	1.99
2501s/d 3000	14	4.65
3001 s/d 3500	42	13.95
3501 s/d 4000	19	6.31
4001 s/d 4500	12	3.99
4501 s/d 5000	1	0.33
> 5000	6	1.99
Total	301	

Sumber: Data primer 2011



Gambar 5.13 Keragaan Kepemiilikan Lahan Pertanian di Desa Bogem, Kecamatan Bayat

Dari Tabel 5.13 dan Gambar 5.13 dapat diketahui bahwa luas kepemilikan lahan pertanian tegalan di Desa Bogem berkisar antara 2.500 m² – 4.500 m² dengan dominasi luas kepemilikan lahan pada luas 3.000 – 3500 m² sebanyak 13,95% dari 301 responden keluarga petani. Lahan pertanian yang berupa tegalan ini juga tidak memberikan produktivitas yang baik karena tidak ada air pengairan yang rutin. Pertanian di Desa Bogem hanya menggantungkan pada air hujan. Produktivitas yang kurang baik membawa konsekuensi terhadap usahatani yang tidak efisien dan pendapatan usahatani yang rendah.

Hal menarik lain dari kepemilikan lahan pertanian di Desa Bogem adalah rumahtangga petani yang tidak memiliki lahan pertanian tegalan ini tercatat sangat banyak yaitu mencapai angka 65,45% dari 301 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian bukan merupakan sumber pendapatan andalan di Desa Bogem ini. Oleh karena itu, sangat dapat dipahami jika luas kepemilikan lahan pertanian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bogem.

9. Luas lahan garapan

Lahan garapan merupakan lahan yang digarap oleh seorang petani yang dapat berasal dari lahan miliknya sendiri, milik orang lain yang disewa, dan atau milik orang lain yang dikerjakan dengan sistem bagi hasil.

Nilai koefisien regresi (β_8) yang positif dan tidak signifikan berarti bahwa peningkatan luas garapan oleh petani tidak diikuti oleh peningkatan pengentasan kemiskinan secara signifikan di Desa Bogem. Hal ini dapat dipahami mengingat jumlah petani penggarap yang ada di Desa Bogem yang tidak banyak begitu pula keberadaan jumlah kepemilikan lahan yang juga terbatas.

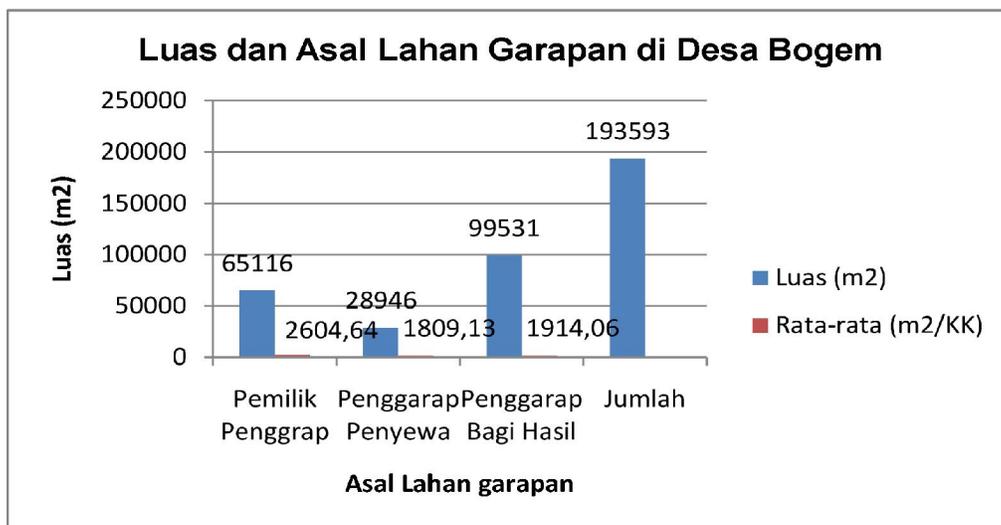
Untuk membantu menjelaskan fenomena pengaruh dari luas lahan garapan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bogem dapat dipelajari Tabel 5.14 dan Gambar 5.14 dan Gambar 5.15 berikut.

Tabel 5.14. Distribusi Luas dan Asal Lahan Garapan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Asal Lahan Garapan	Luas (m ²)	(%)	Jml Penggarap (KK)	Rata-rata (m ² /KK)
Pemilik Penggrap	65116	33.64	25	2.604.64
Penggarap Penyewa	28946	14.95	16	1.809.13
Penggarap Bagi Hasil	99531	51.41	52	1.914.06
Jumlah	193593	100	93	

Sumber: Hasil analisis data primer 2011.

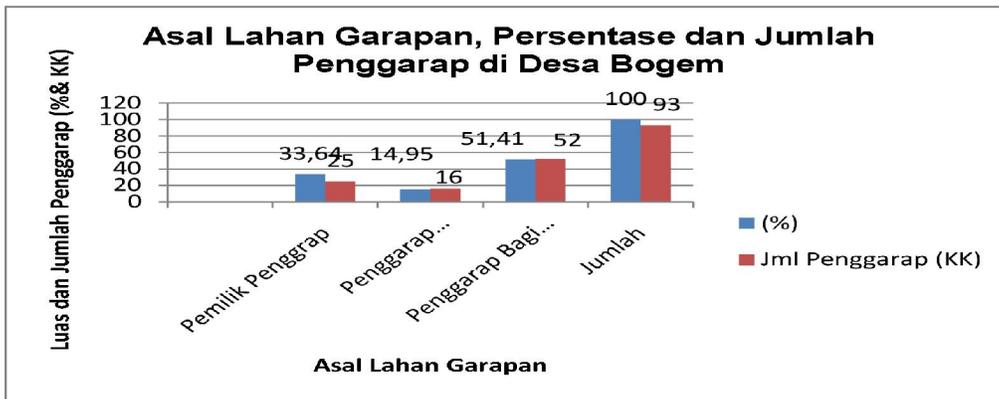
Jika diperhatikan dari Tabel 5.14 dan Gambar 5.14 diketahui bahwa berdasarkan asalnya lahan garapan dapat berasal dari lahan milik yang digarap oleh pemiliknya, lahan garapan yang berasal dari kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan penggarapnya, dan lahan garapan dari menyewa.



Gambar 5.14. Luas dan Asal Lahan Garapan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat

Lahan garapan yang berasal dari kesepakatan bagi hasil ini seluas 9.9531 m² atau 9,953 ha atau dibulatkan 10 ha (51,41%) yang dikerjakan oleh sebanyak 52 orang penggarap bagi hasil dengan luas rata-rata 1.914 m² per penggarap.

Lahan garapan yang berasal dari kesepakatan bagi hasil menduduki luasan paling tinggi yang hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal masyarakat petani miskin di Desa Bogem untuk membeli lahan pertanian atau menyewa lahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penggarap bagi hasil diperoleh informasi bahwa lahan-lahan yang mereka garap itu berasal dari para pemilik lahan pertanian yang telah tidak mampu lagi mengerjakannya karena sudah tua dan atau tidak mampu mengerjakan karena yang memiliki lahan tidak lagi tinggal di Desa Bogem.



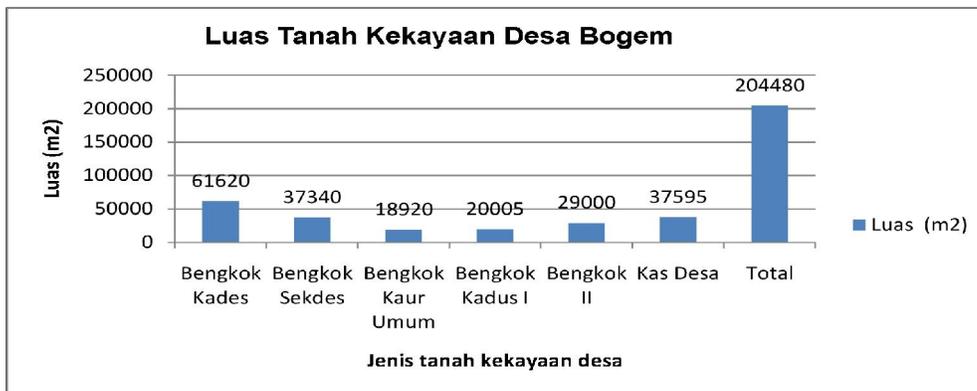
Gambar 5.15 Asal Lahan Garapan, luas (%), dan jumlah Penggarap (KK) di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Selain itu, kebanyakan dari mereka menggarap lahan pertanian dari lahan bengkok para pamong desa dan tanah kas desa yang cukup luas yang tidak sanggup dikerjakan sendiri karena kesibukan tugas kantor (Tabel 5.16). Disamping itu, pamong memberdayakan masyarakatnya untuk mengerjakan lahan pelungguhnya dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang memang dalam kondisi kekurangan pekerjaan.

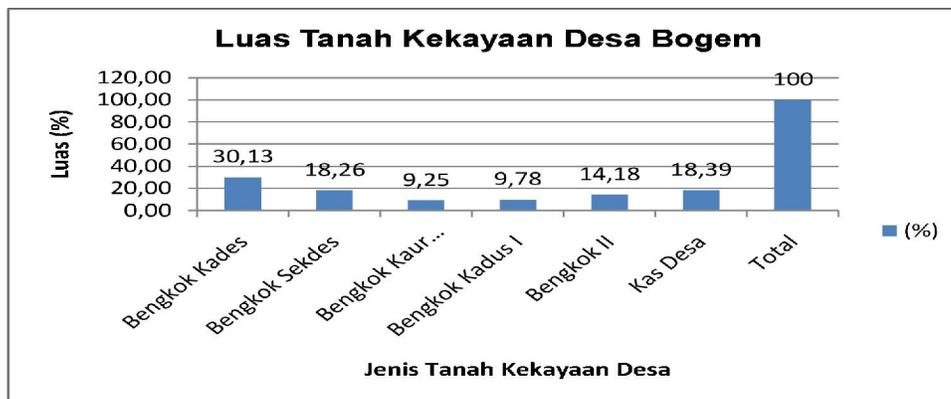
Tabel 5.16 Keragaan jenis dan luas tanah kekeyaan desa dan bengkok di Desa Bogem, Kecamatan Bayat

Tanah Desa	Luas (m ²)	(%)
Bengkok Kades	61620	30.13
Bengkok Sekdes	37340	18.26
Bengkok Kaur Umum	18920	9.25
Bengkok Kadus I	20005	9.78
Bengkok II	29000	14.18
Kas Desa	37595	18.39
Total	20.4480	100

Sumber: Hasil analisis data sekunder tahun 2011.



Gambar 5.16. Keragaan jenis dan luas tanah kekeyaan desa dan bengkok di Desa Bogem, Kecamatan Bayat (m²)



Gambar 5.17 Keragaan jenis dan luas tanah kekeyaan desa dan bengkok di Desa Bogem, Kecamatan Bayat (%)

Lahan garapan berikutnya berasal dari lahan milik sendiri. Lahan garapan yang berasal dari pemilik lahan ini mencakup luasan 6.5116 m² atau 6,5116 ha. Lahan seluas itu dikerjakan oleh sebanyak 25 kepala keluarga petani dengan luas rata-rata garapan per KK adalah 2.604 m² atau sekitar 0,25 ha. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik penggarap lahan pertanian ini diketahui bahwa lahan pertanian yang mereka miliki itu umumnya berasal dari warisan orang tuanya. Hal ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat Desa Bogem yang lebih cenderung bertahan daripada berkembang.

Lahan garapan yang paling sempit adalah lahan garapan yang berasal dari sewa. Hal ini dapat dimaklumi karena kemampuan keuangan kebanyakan masyarakat Desa Bogem yang kurang baik. Lahan garapan yang berasal dari sewa ini seluas 2.8946 m² atau 2,895 ha (14,95%) dengan rata-rata lahan garapan per penggarap seluas 1.809 m² atau hampir 0,2 ha.

Dalam bandingannya dengan jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Bogem sebanyak 545 KK, maka proporsi jumlah KK penggarap terhadap jumlah KK Desa Bogem tersebut adalah $\{(25 + 16 + 52) \text{ KK} / 545 \text{ KK}\} \times 100\% = 17,06\%$. Data ini menunjukkan bahwa hanya sebanyak 17,06 % atau 93 KK yang berusahatani sedangkan sisanya sebanyak 452 KK lainnya menggeluti pekerjaan lainnya termasuk para pengangguran. Informasi ini sekaligus juga menjelaskan mengapa luas lahan garapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bogem.

Secara lebih rinci proporsi KK yang sebagai pemilik penggarap adalah 4,6%, proporsi KK yang sebagai penggarap penyewa sebesar 2,94%, dan proporsi KK yang

sebagai penggarap bagi hasil adalah sebesar 9,54% dari total KK yang ada di Desa Bogem sebanyak 545 KK. Data ini menggambarkan bahwa potensi pertanian tidak dapat diandalkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa Bogem ini.

10. Jumlah variasi pekerjaan Kepala Keluarga

Variabel jumlah variasi pekerjaan kepala keluarga dalam rumahtangga petani adalah banyaknya jenis pekerjaan yang digeluti oleh setiap orang kepala keluarga rumahtangga petani untuk memperoleh pendapatan rumahtangganya. Semakin banyak jumlah variasi pekerjaan tersebut diharapkan akan diperoleh pendapatan rumahtangga yang lebih tinggi dan diharapkan rumahtangga yang demikian akan bebas dari kemiskinan.

Nilai koefisien regresi (β_9) yang positif dan tidak signifikan menggambarkan bahwa peningkatan jumlah variasi pekerjaan yang digeluti oleh KK di Desa Bogem belum secara signifikan mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dipahami jika memperhatikan data tentang kondisi pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan para KK di Desa Bogem seperti yang disajikan pada Tabel 5.17 dan Tabel 5.18, serta Gambar 5.18 dan Gambar 5.19.

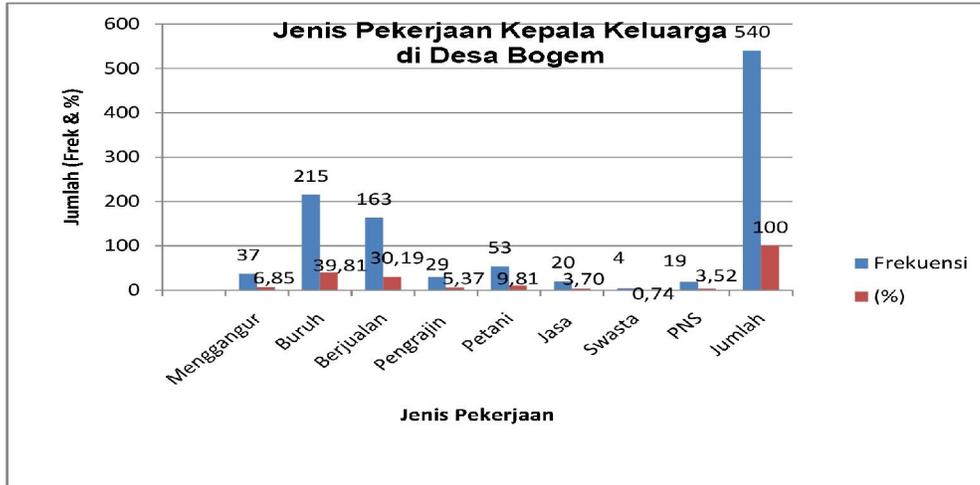
Dari tabel dan gambar tersebut diketahui bahwa warga Desa Bogem yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani hanya 9,81% sehingga pendapatan dari sektor pertanian tidak dapat diandalkan untuk pengentasan kemiskinan di Desa Bogem. Namun demikian, jumlah buruh dan warga yang berjualan keduanya menduduki porsi 70% dari seluruh KK yang ada di Desa Bogem. Hal ini sebenarnya

menggambarkan bahwa cara yang dapat ditempuh untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Bogem adalah kemampuan *interpreneurship* warganya. Namun demikian, mengingat rata-rata pendidikan para KK nya tergolong rendah maka hal yang dapat dikerjakan hanyalah sebagai buruh dan bakulan (pedagang makanan). Oleh karena itu, walaupun ada pekerjaan lain selain pertanian, namun belummampu mengentaskan keluarga mereka dari kemiskinan. Uraian ini sekaligus menerangkan bahwa variabel jumlah variasi pekerjaan belum mampu mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan secara signifikan di Desa Bogem. Terlebih lagi ditunjukkan pada Tabel 5.11 dan gambar 5.11 bahwa KK yang memiliki pekerjaan sampingan tersebut hanya sebanyak 14,84% dari KK yang ada.

Tabel 5.17. Komposisi kepala keluarga berdasarkan pekerjaannya di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Pekerjaan	Frekuensi	(%)
Menggangur	37	6.85
Buruh	215	39.81
Berjualan	163	30.19
Pengrajin	29	5.37
Petani	53	9.81
Jasa	20	3.70
Swasta	4	0.74
PNS	19	3.52
Jumlah	540	100

Sumber: Hasil analisis data primer 2011.

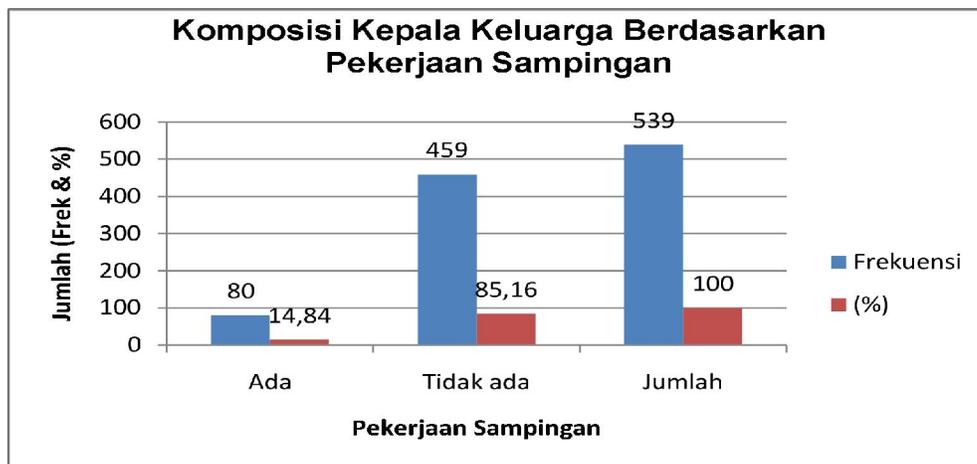


Gambar 5.18. Komposisi kepala keluarga berdasarkan pekerjaannya di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Tabel 5.18. Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Sampingan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Pekerjaan Sampingan	Frekuensi	(%)
Ada	80	14.84
Tidak ada	459	85.16
Jumlah	539	100

Sumber: Hasil analisis data primer, 2011.



Gambar 5.19. Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Sampingan di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

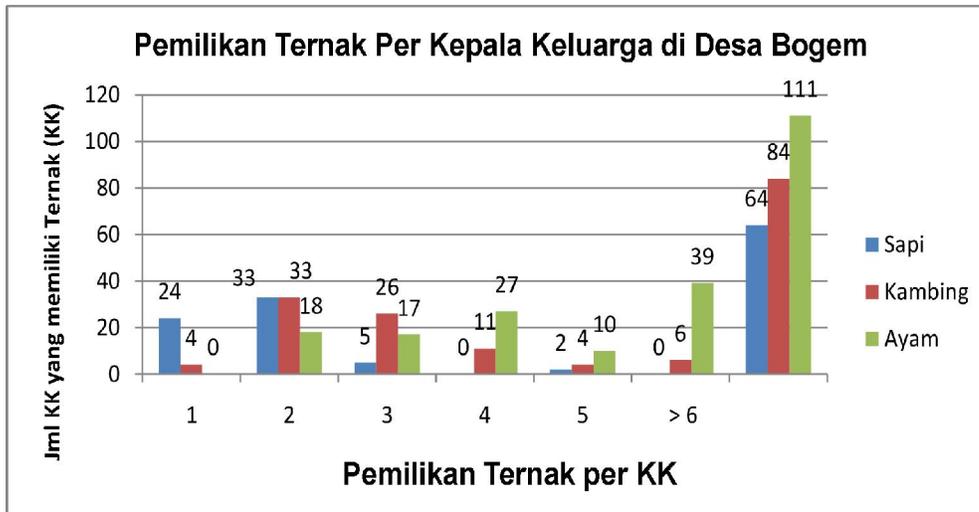
Bentuk mata pencaharian lainnya yang penting sebagai salah satu sumber pendapatan rumahtangga petani adalah peternakan. Namun demikian, di Desa Bogem kondisi peternakannya belum menggembirakan terbukti dengan jumlah pemilikan hewan ternak baik sapi, kambing, dan ayam per rumahtangga petani yang rata-rata sedikit (Tabel 5.19 dan Gambar 5.20).

Berdasarkan Tabel 5.19 dan Gambar 5.20 tersebut diketahui bahwa pemilikan hewan ternak rata—rata adalah berkisar antara 1-2 ekor untuk sapi, 1-4 ekor untuk kambing, dan 2- > 6 ekor untuk ayam. Berdasarkan jumlah pemilikan hewan ternak ini dapat diduga bahwa peran dari peternakan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Bogem belum nyata.

Tabel 5.19. Kepemilikan ternak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat

Banyaknya Ternak /KK (Ekor)	Jml KK yang memiliki:					
	Sapi		Kambing		Ayam	
	Frek	(%)	Frek	(%)	Frek	(%)
1	24	37.50	4	4.76	0	0.00
2	33	51.56	33	39.29	18	16.22
3	5	7.81	26	30.95	17	15.32
4	0	0.00	11	13.10	27	24.32
5	2	3.13	4	4.76	10	9.01
> 6	0	0.00	6	7.14	39	35.14
	64	100	84	100	111	100

Sumber: Hasil analisis data primer 2011



Gambar 5.20. Kepemilikan ternak di Desa Bogem, Kecamatan Bayat

11. Umur kepala keluarga

Umur kepala keluarga rumahtangga petani diharapkan menggambarkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan guna membiayai hidup anggota keluarganya. Sampai batas tertentu peningkatan umur KK akan diikuti oleh peningkatan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan dan menurun kembali pada umur berikutnya.

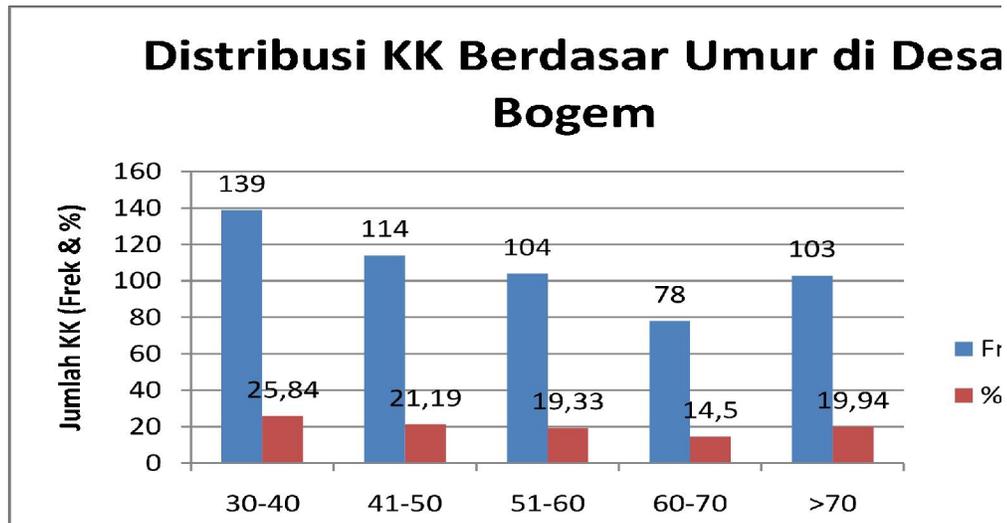
Dari hasil regresi dihasilkan nilai koefisien regresi (β_{10}) yang negatif dan tidak signifikan yang menggambarkan bahwa peningkatan umur KK diikuti oleh penurunan secara tidak signifikan kemampuannya mengentaskan kemiskinan di Desa Bogem.

Tabel 5.20. Klasifikasi penduduk menurut umur di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Kelompok Umur	Frekuensi	%
30-40	139	25.84
41-50	114	21.19
51-60	104	19.33

60-70	78	14.5
>70	103	19.94
Jumlah	539	100

Sumber: Analisis data sekunder 2011.



Gambar 5.21. Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Umur di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.

Hal tersebut tampak relevan dengan komposisi KK menurut umur di Desa Bogem yang menunjukkan frekuensi kelompok umur yang relatif sama (Tabel 5.20 dan gambar 5.21), sehingga tidak mampu menunjukkan perannya secara signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

5.3 Luas Penguasaan Pemilikan Lahan Pertanian dan Jenis Usahatani Untuk Mentas dari Kemiskinan di Desa Bogem

Untuk menentukan luas pemilikan minimal lahan pertanian yang digunakan untuk mendapatkan guna mentas dari kemiskinan adalah dilakukan analisis usahatani beberapa tanaman sbb:

Tabel 5.20. Contoh analisis pendapatan usahatani padi menggunakan harga bayangan

NO	URAIAN	VOLUME (Unit)/ ha	Satuan Kemasan	HARGA (Rp/ Unit)	NILAI (Rp/ha)
A	Biaya Variabel				
	Bibit	54.17	1 kg	7500	406,250
	Pupuk				
	a. Urea	208.33	1 kg	1927.312 *	401,523
	b. NPK	208.33	1kg	2656.496 *	553,437
	Insektisida				
	a. Diazinon	8.33	Rp/100ml	12821.56 *	106,846
	Tenaga kerja	Jam :			
	a. Mengolah tanah	42	2500	105000	105,000
	b. Penyemaian	4	2500	10000	10,000
	c. Tanam&sulam	9	2500	22500	22,500
	d. PemupukanI	0.5	2500	1250	1,250
	e. Penyemprotan	0.5	2500	1250	1,250
	f. Penyiangan	20	2500	50000	50,000
	g. Panen	24	2500	60000	60,000
	h. Transportasi	5	2500	12500	12,500
	i. Jemur	12	2500	30000	30,000
	Ongkos penggilingan padi	1			720,000
	Transportasi				307,692
	Biaya pasca panen				
	Jumlah biaya variabel				2,788,249
	Biaya tetap				
	Penyusutan peralatan				
	Sprayer	0.07	1 buah	40704.15 *	2,714
	Cangkul	1.00	1	150000.00	150,000
	Sabit	1.00		75000.00	75,000

Lanjutan Tabel 5.20

NO	URAIAN	VOLUME (Unit)/ ha	Satuan Kemasan	HARGA (Rp/ Unit)	NILAI (Rp/ha)
	Alat penyiang rumput	1.00			0
	Sewa lahan	1			1,555,556
	Pajak PBB	1		250000	250,000
B.	Jumlah biaya tetap				2,033,269
	Total biaya				4,821,518
C.	Penerimaan	3000		2857.0376	8,571,113
D	Pendapatan tanam padi				3,749,595
*	Komponen Import				

Tabel 5.21. Contoh analisis usahatani kacang tanah menggunakan harga bayangan

NO	URAIAN	VOLUME (Unit)/perha	Satuan	HARGA (Rp/ Unit)	Jenis Input/Output	NILAI (Rp/ha)
A	Biaya Variabel					
	Bibit	100.00	kg	20000		2,000,000.00
	Pupuk					
	TSP	76.92	kg	2102.6192		161,739.94
	Insektisida					
	a. Diazinon	8.33	liter	12821.56		106,846.33
	Tenaga kerja					
	Traktor	1	hari			70,000.00
	Menanam	184.62	jam	2500		461,538.46

Dangir	123.08	jam	2500	307,692.31
Pengairan	76.92	jam	2500	192,307.69
Panen	123.08	jam	2500	307,692.31
Jemur	8.00	jam	2500	20,000.00
Kupas	184.62	jam	2500	461,538.46
Transportasi	7.69		40000	307,692.31
Jumlah biaya variabel				4,397,047.81
Biaya tetap				
Penyusutan peralatan				
Sprayer	0.07	1 buah	40704.15 *	2,713.61
Cangkul	1.00	1	150000.00	150,000.00
Sabit	1.00		75000.00	75,000.00
Alat penyiang rumput	1.00			0.00
Sewa tanah	1			1,555,555.56
Pajak PBB	1		250000	250,000.00
Jumlah biaya tetap				2,033,269.17
C. Total biaya				6,430,316.98
D. Penerimaan	1384.62		9341.216	12,933,991.38
E. Pendapatan tanam kacang tanah				6,503,674.41

* Komponen Import

Tabel 5.22 Contoh analisis usahatani jagung menggunakan harga bayangan

NO	URAIAN	VOLUME (Unit)/perha	Satuan Kemasan	HARGA (Rp/ Unit)	Jenis Input/Output	NILAI (Rp/ha)
A	Biaya Variabel					
	Bibit	46.15	kg	10000		461,538.46
	Pupuk					
	a. Urea	115.38	kg	1927.312 *		222,382.15
	b. KCL	38.46	kg	1840.0052 *		70,769.43
	Insektisida					
	a. Diazinon	8.33	Rp/100ml	12821.56 *		106,846.33
	Tenaga kerja	Jam :				
	a. Mencangkul	31		2500		76,923.08
	b. Menanam	92		2500		230,769.23
	c. Gulut	92		2500		230,769.23
	d. Pengairan	38		2500		96,153.85
	e. Memupuk	8		2500		19,230.77
	f. Memanen	115		2500		288,461.54
	g. Menjemur	46		2500		115,384.62
	Ongkos penggilingan jagung	1777.78	kg	50		88,888.89
	Transportasi					307,692.31
	Biaya pasca panen					
	Jumlah biaya variabel					2,315,809.88
B.	Biaya tetap					
	Penyusutan peralatan					

Sprayer	0.07	1 buah	40704.15	*	2,713.61
Cangkul	1.00	1	150000.00		150,000.00
Sabit	1.00		75000.00		75,000.00
Alat penyang rumput	1.00				0.00
Sewa tanah	1				1,555,555.56
Pajak PBB	1		250000		250,000.00
Jumlah biaya tetap					2,033,269.17
C. Total biaya					4,349,079.05
D. Penerimaan	4,777.78		1337.69624		6,391,215.37
E. Pendapatan tanam jagung					2,042,136.32

* Komponen Import

Dari ketiga contoh perhitungan usahatani tanaman padi, jagung, dan kacang tanah tersebut, maka dapat diketahui bahwa pendapatan dari usahatani tanaman padi, kacang tanah, dan jagung seluas 1 ha lahan pertanian dalam satu musim tanam masing-masing adalah sebesar Rp. 3.749.595,-; Rp. 6.503.674,41,- dan Rp. 2.042.136,32.

Selanjutnya untuk mengetahui luasan lahan minimal yang diolah untuk mentas dari kemiskinan adalah membandingkan pendapatan tersebut dengan nilai batas ambang kemiskinan menurut Sayogyo sebesar Rp. 2.080.000 per kapita per tahun, atau menurut Bank Dunia sebesar Rp. 2.475.000 per kapita per tahun. Tujuan ini dapat ditempuh dengan perhitungan sbb:

1. Jika ditanami padi maka luas lahan yang diperlukan adalah $(Rp. 2.080.000/3 \times Rp. 3.749.595) \times 1 \text{ ha} = 1.849 \text{ m}^2$.
2. Jika ditanami kacang tanah maka luas lahan sawah yang diperlukan adalah $(Rp. 2.080.000/3 \times Rp. 6.503.674,-) \times 1 \text{ ha} = 1.066 \text{ m}^2$.
3. Jika ditanami jagung maka luas lahan sawah yang diperlukan adalah $(Rp. 2.080.000/3 \times Rp. 2.043.136,-) \times 1 \text{ ha} = 3.395 \text{ m}^2$.

5.4 Macam dan Manfaat Program-program Pengentasan Kemiskinan di Desa Bogem

Desa Bogem pernah menerima proyek PNPM yang dialokasikan untuk kegiatan fisik yaitu pembangunan talut di lingkungan lahan pertanian sepanjang 600 meter pada tahun 2010. Selain itu, Desa Bogem juga pernah menerima bantuan PNPM yang berupa pelatihan menjahit dan membuat kue masing-masing sekali selama 3 minggu untuk sebanyak 30 peserta. Untuk mendukung kegiatan ini juga diterima bantuan peralatan untuk membuat kue sebanyak 1 unit per kelompok. Bantuan lainnya berupa mesin jahit sebanyak 5 unit untuk semua kelompok (Hasil komunikasi pribadi dengan para Pamong Desa Bogem, 2011).

Masyarakat Desa Bogem juga menerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk sebanyak 406 KK.

Desa Bogem juga merupakan salah satu desa penerima bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin). Penerima bantuan beras untuk keluarga miskin sebanyak 406 KK, dengan frekuensi satu kali dalam sebulan. Mengingat jumlah KK yang seharusnya berhak menerima lebih banyak dari 406, maka bantuan raskin yang sebanyak 406 tersebut dibagi merata untuk penerima yang lebih banyak dari 406 KK tersebut. Cara ini merupakan kebijakan Pemerintah Desa Bogem untuk menghindari terjadinya disharmoni antar warga desa, walaupun pada saatnya 10% dari mereka tidak mau menerima raskin tersebut. Besarnya Raskin adalah 15 kg beras untuk 406 penerima yaitu sebanyak 6.090 kg beras atau 6,09 ton beras.

Mulai masa pemerintahan Presiden Soeharto Desa Bogem menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 24 juta rupiah per tahun. Pada tahun 2009 Desa Bogem mendapat bantuan ADD tersebut sebesar 75 juta rupiah yang dialokasikan

sebanyak 75% untuk kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 30% sisanya untuk pembelian peralatan kantor desa dan Badan Pertimbangan Desa (BPD).

Di bidang pertanahan, pada tahun 1987 Desa Bogem menerima bantuan PRONA untuk sertifikasi tanah sebanyak 350 bidang tanah. Pada tahun 2009 mendapat bantuan PRODA untuk sertifikasi tanah sebanyak 100 bidang. Kebanyakan sertipikat tanah diagunkan ke Bank BRI untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Modal ini umumnya digunakan oleh masyarakat pemilik tanah untuk modal berjualan dawet, nasi kucing, dan bubur kacang hijau (burjo), dan berjualan candak kulak serta berdagang (bakulan) di pasar. Mereka umumnya berjualan di luar Desa Bogem bahkan sampai ke Kota Klaten, Prambanan dan Yogyakarta.

Di bidang pertanian di Desa Bogem dibentuk dua kelompok tani yaitu Kelompok Tanai Bhakti Makmur yang diketuai oleh Bapak Paimin dan Pake Yup yang diketuai oleh P Margono. Kelompok tani tersebut beranggotakan sebanyak 67 orang dan yang aktif sebanyak 45 orang. Kedua kelompok tani tersebut selanjutnya membentuk Gapoktan Sidomakmur. Dalam perjalanannya Gapoktan ini memperoleh bantuan dana Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebesar 100 juta yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam dengan bunga murah. Selama 10 tahun telah diperoleh penambahan modal yang berasal dari bunga simpan pinjam tersebut sebesar 10 juta atau 10% dari dana awalnya.

Wujud bantuan lain dari pemerintah di bidang pertanian bagi Desa Bogem adalah kegiatan penyuluhan bidang pertanian tentang cara bercocok tanam dan teknik pemberantasan hama. Bantuan bidang pertanian yang diterima oleh Desa Bogem adalah

pompa air sebanyak 2 unit dengan daya 5 PK, walaupun di Desa Bogem sudah banyak masyarakat yang memiliki pompa air berupa diesel untuk mengairi tegalannya.

Bantuan kesehatan melalui kegiatan ibu-ibu berupa arisan setiap tanggal 6 dan kegiatan Pos Yandu. Di Desa Bogem terdapat 4 Pos Yandu yang dibagi 2 unit di Dusun I dan 2 unit lainnya di Dusun II. Dalam Posyandu ini dikembangkan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, ADIRA memebrikan bantuan berupa pemeriksaan dan kegiatan pengobatan gratis untuk warga Desa Bogem ini. Rumah sakit Solo juga melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis terhadap warga Desa Bogem yang sakit. Puskesmas juga melayani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Reforma agraria yang pernah ada adalah bantuan bibit tanaman buah-buahan dan tanaman kayu-kayuan meliputi mangga, jati, rambutan, dan sukun sebanyak 200 batang dari Pabrik Rokok Jarum Kudus, namun bibit-bibit tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan karena telah setengah kering atau setengah mati.

5.5 Implikasi Kebijakan untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Bogem.

Berdasarkan uraian tentang (a) struktur rumahtangga petani berdasarkan kemiskinannya, (b) faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, (c) kondisi kuantitas, kualitas, dan umur SDM, matapencapaian KK, produktivitas lahan pertanian, pendapatan petani dari usahatani, pendapatan petani dari luar usahatani, ketrampilan warga dalam kerajinan bambu dan irus, potensi peternakan, jumlah anak dan tanggungan keluarga, pendidikan anak-anak, serta (d) bantuan-bantuan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa Bogem tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa pemikiran yang diharapkan berguna dalam rangka mengentaskan warga miskin Desa Bogem dari kemiskinannya sebagai berikut:

1. Luas lahan pertanian yang terbatas dan produktivitasnya yang rendah karena tidak tersedianya air pengairan menyebabkan keterbatasan jenis tanaman yang dapat diusahakan dan dikembangkan di Desa Bogem. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya pendapatan dari usahatani di desa ini yang rata-rata hanya menyumbang 32% dari pendapatan total rumahtangga petani. Kondisi ini menggambarkan adanya keterbatasan jika ditempuh upaya pengentasan kemiskinan di Desa Bogem dari sektor pertanian. Dengan pernyataan lain, disamping berupaya meningkatkan dayaguna usahatani penting ditempuh upaya-upaya pengembangan sektor nonpertanian untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Bogem.
2. Potensi yang ada dan dapat dikembangkan di Desa Bogem meliputi:
 - a. Kerajinan anyaman bambu berupa anyaman untuk tampah, kalo, dan tambir yang dapat dikerjakan oleh para orang tua termasuk para lanjut usia dan dikerjakan oleh para remaja dan orang dewasa di sela-sela aktivitas utama mereka sehingga dapat menekan angka beban keluarga. Dalam hal ini perlu pendampingan dan penyuluhan dari dinas perindustrian baik dalam hal pembuatannya maupun pemasarannya.
 - b. Kerajinan dari batok kelapa untuk membuat irus yang dapat dikerjakan oleh para muda, orang dewasa di sela-sela pekerjaan utamanya, dan oleh para lansia sehingga menekan angka tanggungan keluarga. Dalam hal ini perlu pendampingan dan penyuluhan dari dinas perindustrian baik dalam hal pembuatannya maupun pemasarannya.
 - c. Kerajinan membatik, yang selama ini mereka hanya sebagai tukang yang diupah. Akan lebih meningkatkan manfaat bagi mereka seandainya mereka bekerja untuk

- dirinya sendiri. Dalam hal ini perlu pendampingan dan penyuluhan dari dinas perindustrian baik dalam hal pembuatannya maupun pemasarannya, termasuk pinjaman modal lunak.
- d. Kemampuan masyarakat Desa Bogem untuk membuat dawet yang cukup terkenal yang dapat dikembangkan permodalannya sehingga dapat membuka warung di luar wilayah Desa Bogem.
 - e. Kemampuan masyarakat Desa Bogem untuk membuat bubur kacang hijau yang cukup terkenal yang dapat dikembangkan permodalannya sehingga dapat membuka warung di luar wilayah Desa Bogem.
 - f. Kemampuan dalam pertukangan perlu dikembangkan sehingga dapat bersaing dengan para tukang lainnya dari luar daerah, dengan demikian para tukang dari Desa Bogem dapat mengerjakan bangunan-bangunan dengan kualitas lebih baik di luar wilayah Desa Bogem.
3. Luas penguasaan, pemilikan, dan lahan garapan pertanian yang sempit menyebabkan para petani masih memiliki waktu luang, yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara ternak. Dalam hal ini perlu bantuan berupa penyuluhan mengenai budidaya peternakan, pakan ternak, kesehatan ternak, pasar ternak, reproduksi ternak, dan permodalan lunak untuk berusaha ternak. Lahan-lahan kurang produktif dapat digunakan untuk menanam hijauan pakan ternak sehingga mempermudah penyediaan pakan ternak.
 4. Pendidikan para orang tua yang kurang memadai menyebabkan rendahnya ketaivitas mereka dan menyebabkan rendahnya pendapatan mereka di Desa Bogem. Oleh karena itu, hal ini harus dijadikan kaca benggala bagi anak-anak cucu mereka bahwa

pendidikan penting untuk memperbaiki kualitas hidup pada masa yang akan datang. Untuk kepentingan tersebut diperlukan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi para orang tua dan para anak-anak agar mereka mendapat pencerahan guna merangsang minat baik bagi orang tua mereka maupun anak-anak usia didik untuk tetap bersekolah, terutama memanfaatkan wajib belajar 9 tahun.

5. Pekarangan yang selama ini hanya ditutupi oleh tanaman kayu-kayuan perlu keberanian inovasi untuk merubahnya menjadi pertanaman yang lebih produktif meliputi tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, melinjo, kelapa, nangka, dan untuk kandang ternak.
6. Beberapa bantuan yang diberikan kelihatan belum didasarkan dan disinkronkan dengan potensi Desa Bogem sehingga tampak kurang bermanfaat dan berkembang misal pembangunan talut saluran draenase.
7. Bantuan pelayanan kesehatan musti ditindaklanjuti terus mengingat kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa Bogem yang masih menengah ke bawah.
8. Bantuan yang bersifat mengembangkan kemampuan ketrampilan untuk berwirausaha sangat diperlukan dan perlu terus dikembangkan seperti menjahit dan memasak termasuk membuat kue,
9. Bantuan langsung tunai untuk sementara waktu masih diperlukan oleh masyarakat Desa Bogem.
10. Bantuan raskin perlu diteruskan untuk masyarakat Desa Bogem.
11. Bantuan permodalan yang dapat dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga simpan-pinjam, seperti yang dicontohkan oleh Gapoktan Sidomakmur melalui program PUAP perlu diteruskan dan dikembangkan.

BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Struktur kemiskinan rumahtangga petani berbeda jika penentuannya didasarkan pada kriteria yang berbeda. Struktur kemiskinan rumahtangga petani yang ditentukan berdasarkan kriteria BPS dan Bank Dunia yang dimodifikasi relatif mirip, sedangkan yang ditentukan dengan kriteria Sayogyo sangat berbeda.
2. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan rumahtangga petani di Desa Bogem adalah jumlah anak, pendapatan nonpertanian, dan nisbah pengeluaran pangan dengan pengeluaran total.
3. Luas lahan pertanian minimal dan jenis tanaman yang dibudidayakan yang diperlukan untuk mentas dari kemiskinan adalah seluas 1.849 m² untuk tanaman padi, seluas 1.066 m² untuk tanaman kacang tanah, dan seluas 3.395 m² untuk tanaman jagung.
4. Bantuan-bantuan untuk pengentasan kemiskinan yang pernah turun di Desa Bogem meliputi: (a) bantuan pembangunan fisik, (b) bantuan penyuluhan dan pelatihan, (c) bantuan peralatan, (d) bantuan permodalan, (e) bantuan kesehatan baik pemeriksaan maupun pengobatan, (f) bantuan langsung tunai, (g) raskin, (h) sertifikasi tanah baik melalui PRONA maupun PRODA, dan (i) bantuan tanaman buah-buahan dalam program reforma agraria.
5. Arahan kebijakan yang diusulkan untuk pengentasan kemiskinan di Desa Bogem adalah pemberdayaan potensi nonpertanian melalui peningkatan kualiatas SDM, *interpreneurship*, dan bantuan permodalan.

6.2 Saran

1. Perlu penelitian serupa untuk desa-desa lain yang memiliki keragaman potensi.
2. Perlu memperkuat analisis usahatani untuk menentukan luas lahan minimal yang diperlukan untuk mentas dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Bishop dan Toussaint. 1979. *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta

- BPS 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan 2002 dan 2003*. Badan Pusat Statistik Jakarta.
- BPS Kabupaten Klaten. 1998-2003. *Kecamatan Bayat Dalam Angka 1997-2003*.
- Cox, David. 2004. "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia Pacific Region." Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004.
- Debertin, D. L., 1986. *Agricultural Production Economics*. Second Edition. Mc.Graw Hill Inc. New York.
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Gujarati, D., 1997. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Hadisapoetra, 1977. *Biaya dan Pendapatan didalam Usahatani*. Departemen Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam Djuwari, 2000. *Produksi, Pendapatan, dan Distribusi Pendapatan pada Usahatani Lahan Sawah Irigasi Sumur Pompa dan Tadah Hujan di Daerah Kabupaten Kediri*. Disertasi S-3 Fakultas Pertanian, (Unpublished)
- Hayami, Yijiro dan Maso Kikuchi, 1981. *Asian Village Economy at the cross roads. An Economic Approach to Institutional Change*. University of Tokyo Press.
- Hendriwan. "Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi". www.tripod.com. 8 Pebruari 2003.
- Jamison, D. T., and L. J. Lau, 1982. *Farmer Education And Farm Efficiency*. A World Bank Research Publication. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten. 2004 *Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2004*.
- Kuncoro, M., 2006. *Ekonomika Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemah: Matheos Nalle Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto. 2003. "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th. 02/ April 2003.

- Nasution, Lutfi I. (ed). 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia- 70 Tahun Prof. Sajogyo*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Nicholson, W., 1998. *Microeconomic Theory: Basic Principles And Extentions*. Seventh Edition. The Dryden Press. Foft Worth.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Pindyck, R.S., and D.L Rubinfeld, 2001. *Microeconomics*. Fifth Edition. Prentice Hall International, Inc. London.
- Quibria, MG. and T.N Srinivasan , 1993. *Rural Poverty in Asia*. Oxford University Press Hongkong.
- Remi, Sutvastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ridlo, Mohammad Agung. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit UnissulaPress.
- Rosset, P., K.Deinenger, dan La Via Campesina. 2008. *Reforma Agraria Dinamika Aktor dan Kawasan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rusli, Said .1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.
- Samuelson, P and Nordhaus, WD., 2001. *Microeconomics*. Seventeenth Edition. McGraw-Hill Irwin. Boston.
- Sayogyo, 1986. *Garis Kemiskinan dan Ukuran Tingkat Kesejahteraan Penduduk*. Tidak diterbitkan.
- Sharma, A. N., and V. K. Sharma, 1981. *Elements Of Farm Management*. Prentice Hall Of India Private Limited. New Delhi.
- Soekartawi, John L Dillon., J brian Hardaker., A soeharjo., 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian perkembangan Petani Kecil*. UI Press.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung:Humaniora Utama Press.

- Sahdan, Gregorius. 2005. "Menanggulangi Kemiskinan Desa". *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Maret 2005.
- Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. "Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia." *Smeru Newsletter*, No.03, Mei -Juni. 2001
- Todaro, M.P., and Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia ketiga* Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tim Kajian Kemiskinan Parsitipatoris. 2004. "Memahami Suara Orang Miskin". *Smeru Newsletter*, No.11: Juli-September 2004.
- World Bank, 1993. *Water Resources Management: A World Bank Policy paper*. World Bank, Washington, D.C.
- World Bank Development Report 2000/2001:Attacking Poverty*. Oxford University Press Boston. 2001.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan PerekonomianIndonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Yotopoulos, P.A., and J. B. Nugent, 1976. *Economics Of Development: Empirical Investigations*. Harper And Row Publishers. New York

Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Keputusan Bupati Klaten Nomor 1047 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten.

